

PENGARUH ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP) DALAM TRANSFORMASI PETA POLITIK DI TURKI

A. Miftahul Amin

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: a.miftahulamin@gmail.com*

Abstrak: *Turki modern dalam berbagai aspek banyak mengalami perubahan, khususnya dalam ketatanegaraan dan sistem politik. Perubahan di Turki tidak bisa menafikan partai politik yang menentukan arah ketatanegaraan. Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) merupakan partai yang baru didirikan pada 14 Agustus tahun 2001, tetapi tidak lama kemudian menjadi partai berkuasa di Turki dengan memenangkan Pemilihan Umum tahun 2002, 2007, dan 2011. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: pertama, AKP membawa perubahan besar dalam ketatanegaraan Turki menjadi usmani baru (new ottoman state). Kedua, AKP mempunyai lima strategi sosial politik di Turki, diantaranya (1) strategi hubungan sipil militer yang kompromistis, (2) sosial keagamaan yang egalitarian, (3) pendidikan dan kebudayaan yang mengakui pendirian di luar pemerintah, (4) Menjadikan ekonomi Turki yang stabil dalam aspek mikro dan makro, (5) menjalin hubungan internasional antara Liga Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Ketiga, strategi sosial politik AKP dalam pemerintahan di Turki telah sesuai dengan prinsip politik profetik dan tidak bertentangan dengan sistem politik di Turki. Keempat, signifikansi AKP dalam konteks perpolitikan di Indonesia sangat relevan karena Turki dan Indonesia mempunyai kesamaan dalam menjalankan ketatanegaraan dan sistem politiknya.*

Kata Kunci: *Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP), Sistem Politik, dan Politik Profetik.*

A. Pendahuluan

Turki bagi umat Islam di *saentero* dunia adalah bagian terpenting dari sejarah gemilang peradaban Islam, di negeri itu telah tercatat prestasi sejarah Islam, pernah menjadi pusat kekuasaan dunia Islam yang tidak terkalahkan hampir selama delapan abad dan menjadi negara yang di

segani Eropa.¹

Turki Merupakan bagian terpenting dari sejarah Islam modern, kebesaran peradaban Islam menjadi kian berpengaruh dan berdiri sendiri sejajar dengan peradaban lain ketika pijarnya terang benderang di Turki, relitas masa lalu itu sangat mungkin dan mendukung untuk terjadi. Sebab, secara geografis Turki memiliki letak yang strategis sehingga menjadikannya sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Negara ini memang berada di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya berada di benua Eropa. Turki berada enam puluh persen di Asia dan sisanya berada di Eropa, persinggungan dengan Eropa menjadikan Negara ini berbeda dengan berpenduduk muslim lainnya di belahan dunia Islam.

Turki telah lama dikenal sebagai negara Islam yang menganut ideologi politik yang lebih condong ke Barat semenjak runtuhnya kekaisaran Islam Ottoman yang digantikan dengan Republik Turki pada tahun 1923. Setelah itu rakyat Turki dengan dimotori oleh Mustafa Kemal Attaturk secara resmi pada tanggal 3 Maret tahun 1924 menghapus khalifah di bumi Turki. Di bawah komando Mustafa Kemal Attaturk, Turki mengadopsi nilai-nilai ideologi Barat dalam sendi-sendi pemerintahannya melalui progam reformasi politik yang berwacanakan westernisasi dan modernisasi. Sistem kesultanan dan kekhalfaan dihapuskan dari sistem pemerintahan, agama dipisahkan dari kehidupan pemerintahan sehari-hari, fungsi agama dalam kehidupan berpolitik diatur langsung oleh negara, dan pembentukan konsepsi mengenai solidaritas serta kepentingan nasional yang berada di atas kepentingan kelompok minoritas.

Perombakan sistem pemerintahan ini di sisi lain membawa konsekuensi tertentu terhadap perekonomian Turki dengan beralihnya pedagang-pedagang Armenia dan Yunani dari wilayah Turki yang sebelumnya disatukan dalam kekuasaan kekaisaran Ottoman.⁴ Dihadapkan pada situasi ini Turki, di masa-masa awal sebagai negara Republik, memiliki arah politik luar negeri yang cenderung berafiliasi dengan kekuatan besar di Eropa dan Amerika Serikat melalui hubungan kerjasama ekonomi. Turki tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari Timur Tengah, dan melihat keterikatan hubungannya dengan Timur Tengah melalui kacamata posisinya sebagai rekan potensial bagi aliansi Barat.

Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal, Turki mendeklarasikan

¹ Komaruddin Hidayat dalam Pengantar buku karangan Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. xv.

diri sebagai Negara sekular, posisi agama berada di ruang privat dengan dibawah kontrol negara. Sekularisme bagi Mustafa Kemal adalah pilihan paling tepat untuk membawa Turki menjadi Negara Negara lebih baik,² sejajar dengan negara-negara Barat, khususnya Eropa. Sekularisme baginya adalah motor penggerak kemajuan pembangunan, sebaliknya, Islam di mata Mustafa Kemal adalah statis dan hanya menghambat pembangunan. Sehingga tidak memberikan ruang kebebasan bagi yang berbau Islam. Gagasan sekularisme semakin kokoh karena, konstitusi Turki menghendaki itu, dengan dikawal oleh militer, yang berada dibawah kontrol Mustafa Kemal.

Secara perlahan kedigdayaan militer dalam mengawal konstitusi warisan Mustafa Kemal perlahan mencair dan mengarah pada perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Turki. Gelombang demokratisasi di seluruh penjuru dunia pada tahun 1980-an diiringi gelombang kesadaran politik masyarakat sipil di berbagai belahan dunia, dan khusus untuk Turki keinginan untuk menjadi dari bagian dari Uni Eropa prasyaratnya adalah menjalankan demokrasi utuh, turut membuka mata banyak orang di Turki. Mereka yang melihat gagasan sekularisme ala Mustafa Kemal telah kehilangan orientasi mencoba bermain jalur politik secara sehat, mereka mendirikan partai dan mengikuti pemilu secara konstitusional.

Gerakan sosial keagamaan di Turki secara tidak langsung membawa angin segar dalam ketatanegaraan Turki modern, gerakan sosial keagamaan ini tidak begitu *vulgar* dalam menampakkan simbol-simbol keagamaan tetapi dengan cara konstitusional yaitu memasuki ke wilayah partai-partai yang ada di Turki, sehingga hal ini menjadikan pergeseran politik dari Attaturk menuju Ottoman baru.³

Partai AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan) adalah salah satu partai yang baru di kancah perpolitikan di Turki yang telah mendapatkan apresiasi dari masyarakat berupa

² Gagasan Mustafa Kemal juga banyak dipengaruhi oleh konsepsi rasional yang dibangun oleh Ziya Gokalp yang juga kalangan nasionalis. Mencoba mengadopsi peradapan Barat untuk memajukan Turki, Gokalp adalah *Think Thank* sekularisme-nasionalisme Turki. Lihat Ziya Gokalp, *The principles of Turkism*, alih bahasa Robert Devereux (Leiden: 1968), hlm. 38-42.

³ Pandangan Ottoman baru bukan berarti menyebarkan politik perluasan wilayah Ottoman, dan juga bukan kembali pada masa lalu. Pemahaman ini juga telah mengakibatkan perbedaan di dalam negeri Turki sendiri yang diselenggarakan oleh adanya pertikaian antara modernitas tradisional atau Islam dan sekuler. Lihat Syarif Taghiyan, *Ay-Syaikh Ar-Ra 'is Rajab Thayyib Erdogan - Mu 'addin Istanbul Wa Mubathim Ash-Shanam Al-Ataturki*, alih bahasa Masturi Ilham dan Malik Supar (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), hlm. 61-64.

pemenangan pemilihan umum. Partai yang berbasis Islam ini merupakan partai yang didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan bersama Abdullah Gul pada tanggal 14 Agustus tahun 2001. Kedua pendiri partai ini sebelumnya juga berbasis massa Islam. Dalam sistem politiknya, partai yang mengkonsolidasikan diri dalam setahun untuk persiapan pemilihan umum dan kadernya banyak diisi kalangan menengah ini menunjukkan grafik kemenangan yang cukup signifikan jika dilihat dari usianya yang masih sangat muda.

Dalam pemilihan umum 2002 partai AKP memenangkan pesta demokrasi dengan 34 persen suara pemilih. AKP pun menjadi partai yang berkuasa yang mendapatkan 367 kursi dari total 550 kursi di parlemen.⁴ Di sinilah AKP mulai mendapat kepercayaan oleh masyarakat atas kemenangan pemilihan umum tersebut.

Kemenangan AKP terulang lagi pada pemilihan umum tahun 2007,⁵ partai pimpinan Recep Tayyip Erdogan itu memenangkan jabatan strategis yakni jabatan Presiden yang diduduki oleh Abdullah Gul, sedangkan Perdana Mentri nya diduduki oleh Recep Tayyip Erdogan dan menguasai mayoritas kursi di parlemen.⁶

Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2011, AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memenangkan kembali pada pemilihan umum untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di Turki, AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) menang mutlak memenangi pemilihan umum Turki tahun 2011 dengan perolehan suara 49,9 persen. Kemenangan partai politik berhaluan Islam pimpinan Recep Tayyip Erdogan ini merupakan ketiga berturut-turut sejak tahun 2002.

Pada pemilihan umum di Turki tahun 2011 diikuti oleh 15 partai politik dan calon independen. Hasil pemilihan umum tidak jauh berbeda dengan survei menjelang pemilihan umum. Dari 15 partai politik, hanya tiga yang mampu meraih suara di atas 10 persen sebagai ambang batas *parliamentary threshold*. Setelah AKP dengan perolehan suara 49,9%, Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) di urutan kedua dengan perolehan suara 25,9% dan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) di urutan ketiga dengan perolehan suara 12,9%.

Kemunculan partai AKP sebagai aktor yang patut diperhitungkan

⁴ "Historical of Development Party" <http://eng.akparty.org.tr/english/index.html>, diakses pada tanggal 8 November 2013.

⁵ "Political Parties and Election System", <http://turkisembassy.org>, diakses pada tanggal 8 November 2013.

⁶ "Ozal Dosyalar", Turkey: 22 July Election Results "http://www.bbc.turkish, 20july%202007%-20-20Election/Results.html, akses 8 November 2013.

dalam proses demokratisasi Turki bukanlah suatu yang kebetulan. Ia dipengaruhi oleh beragam ancaman eksternal dan internal, budaya politik bangsa yang tertana kuat dimasa lalunya, serta beriringan dengan pengaruh yang dibawah oleh *trend* dunia Internasional. AKP mendapat pengaruh yang besar dalam sistem politik di Turki, dimana AKP dalam tiga periode pemilihan umum selalu berada diatas dari kontestan partai politik lainnya.

Perjuangan AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) cukup signifikan dalam memawarnai sistem politik di Turki yang berhasil menjembatani masyarakat sipil-militer, Islamis-sekular dan gerakan sosial keagamaan yang mampu diakomodir menjadi kebijakan partai dalam menentukan berjalannya pemerintahan dengan baik.

B. Adalet Ve Kalkinma dan Kilas Balik Turki

1. Sejarah Berdirinya AKP

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa partai AKP merupakan entitas yang tidak lahir begitu saja, namun melalui proses sejarah yang melibatkan banyak faktor, "bayi" bernama AKP memiliki genealogi kuat dengan partai berbasis Islam yang sebelumnya cukup konfrontatif dengan rezim berkuasa, yakni partai Islam pimpinan Necmettin Erbakan. Partai AKP merupakan salah satu kelompok elit politik Muslim Turki yang mencoba untuk berkompetisi di kancah perpolitikan untuk memperpresentasikan nilai-nilai keislaman⁷ yang moderat, dimana moderat yang mereka pahami yakni di tengah arus sekularisme radikal.

Untuk partai-partai Islam setidaknya ada beberapa kali pelarangan oleh pihak negara, salah satunya yang dipimpin oleh Erbakan, kepemimpinan dan ketokohan Erbakan tampaknya merefleksikan sebuah pandangan politik yang tidak cukup membantu untuk bermain dalam kancah politik Turki, sebab cara Erbakan cenderung konservatif dan tidak terlalu akomodatif dengan kelompok lain yang tidak satu frame dengan dirinya, sehingga setiap kali ada pelarangan sekaligus pembubaran lantas diikuti dengan mendirikan partai baru. Namun, masih saja menggunakan dan mengedepankan corak Islam, beragam varian wajah dari masa ke masa, demi kontinuitas kepartaian daam berpolitik yang berguna untuk menyesuaikan diri dengan kehendak negara yang menginginkan agar agama dijauhkan dari aktifitas politik, sebagaimana yang dilakukan oleh Erbakan dan rekan politiknya. Sayangnya beberapa kali reformasi kepartaian di

⁷ Namun kelihatannya untuk alasan keamanan baik dari serangan militer maupun kekhawatiran berlebihan dari musuh politik mereka yang sekular, mereka tidak menampakkan sisi keislaman yang bersifat formalistis.

bawah tangan Erbakan bisa dikatakan selalu gagal, ia tidak berhasil menyelamatkan partainya dari hegemoni pihak pemerintah dan semakin tidak melunakkan sikap negara dengan dukungan militer terhadap diri dan organisasi politik Erbakan yang terlanjur memiliki kesan "Islamis anti-sekular" di mata elit sekular.

Kelahiran partai AKP jika ditelusuri lebih jauh, mencakup beragam aspek yang terjadi dan berkembang dalam spektrum politik Turki kontemporer dengan tradisi sekularisme radikal. Secara garis besar, eksistensi dan visibilitas partai Islam di kancah perpolitikan Turki mulai nampak antara 1961-1980,⁵⁵ disamping dibukanya kebebasan untuk mengekspresikan kembali nilai-nilai yang oleh sebagian masyarakat Turki dipendam, berkat nada konstitusi baru yang relatif liberal dan mempermudah kelompok-kelompok keagamaan yang dulunya tertindas untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dalam atmosfer yang tampaknya mendukung ini, beberapa politisi berorientasi Islam yang dipimpin Necmettin Erbakan mendirikan sebuah partai bernama Partai Orde Nasional (PON) pada tahun 1969. Tapi tidak lama oleh Mahkamah Konstitusi Turki, PON dibubarkan dengan dasar pertimbangan "mempergunakan Islam untuk tujuan politik". Pengadilan menganggap PON sebagai partai yang anti sekular sebagaimana yang beraku dan diyakini di Turki, sekularisme bagi mereka bukan hanya pemisahan agama dan negara, tetapi juga dominasi negara atas agama (Islam). Sebagai akibatnya, elit sekular menolak memberikan kebebasan politik dan sipil kepada orang yang menyatakan terinspirasi keyakinan Islam.⁸

Konsepsi demokrasi ini sering mengasingkan bukan hanya kalangan Islam yang di cap sebagai fundamentalis, tetapi juga meresahkan kalangan politisi moderat. Dengan kata lain, Erbakan dan rekan politiknya salah paham dalam beranggapan bahwa orientasi "liberal" rezim juga merangkul Islam.

Tidak ingin menyerah begitu saja ke bawah kaki elit sekular, rekan-rekan dekat atau lebih luas lagi mencakup kader-kader partai yang setia dengan Erbakan mereformasi kembali partai mereka yang terlarang oleh negara, pada tahun 1972 mereka mengganti nama lama dengan mengusung nama baru yakni Partai Keselamatan Nasional (PKN). Menurut Likay Sunar dan Binaz Toprak, dalam hal latar belakang sosio-ekonominya, partai tersebut mewakili proses orang-orang yang menghendaki peran ekonomi dan politik yang lebih besar dalam dunia modernitas yang berkembang. Namun, retorika PKN pro Islam dan ia tampak sebagai konservatif religius. Awalnya partai ini berusaha menolong

⁸ *Ibid.*

orang-orang beragama, yang telah diasingkan dari ruang politik dan publik semenjak masa-masa awal Republik, untuk mempengaruhi proses politik dan merasa diri bagaikan dari sistem, atau menunjukkan iktikad sebagai warga negara sejati. Meskipun PKN lebih lunak dan tidak impresif jika dibandingkan dengan fosil sebelumnya (PON) namun intelektual Kemalis, cendekian dan militer meihatnya sebagai partai yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem sekular. Sehingga, PKN dibubarkan oleh pemerintah militer tahun 1981.

Angin segar kembali didapat oleh kalangan Islamis ketika tampuk kekuasaan Presiden dipegang oleh Turgut Ozal yang datang dari elemen Partai Tanah Air pada tahun 1983. Ozal termasuk kalangan muslim moderat namun mengikuti iklim sekularisme, ia semasa memimpin membawa angin baru demokrasi di Turki, sejumlah aturan dikeluarkannya semata-mata untuk mengakomodasi sekian kepentingan yang ada di Turki, ia bahkan sempat mempertanyakan kelayakan negara serta kebijakan atas Kurdi oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dalam masa-masa kepresidenan Ozal kalangan Islam cukup diuntungkan untuk mengkonsolidasikan diri untuk mencapai tujuan kebijaksanaannya dengan motor partai politik.⁹

Pasca wafatnya Turgut Ozal tahun 1983, warisan atmosfer politik yang tadinya kondusif untuk membangun demokrasi yang sebenarnya, mulai dirampas dan perlahan dibajak oleh kalangan militer dengan mengambil alih kebijakan yang dianggap sebagai langkah pengawalan sekularisme.

Selama masa pemerintahan Ozal ada beberapa momen penting yang berpihak pada kalangan Islam,⁶⁰ dengan didirikannya Partai Kesejahteraan/Partai Refah (PK) berpikiran Islam yang didirikan oleh beberapa rekan Erbakan juga setelah Dewan Keamanan Nasional (DKN) mengizinkan pembentukan partai politik. PK sendiri merupakan

⁹ Selain pada bidang politik, Ozal cukup membantu kalangan Islam pada akses-akses penduduk sipil beragama dalam meraih pekerjaan layanan sipil. "yang tampak paling menarik bagi sejumlah besar warga Turki adalah kemampuan Ozal untuk menegaskan kembali komitmennya kepada Islam dalam lingkungan sekuler dimana ia merasa nyaman", tulis Taylor. Alan R. Taylor, *The Islamic Question in the Middle East Politics* (Boulder and London, Westview Press, 1988), hlm. 91.

⁹ Ozal membangun jembatan baru antara negara, masyarakat dan agama. Ia bahkan memperkenalkan tradisi buka puasa bersama selama bulan Ramadhan pada lingkup administrasinya dan menjadi Perdana Menteri Turki pertama melaksanakan ibadah haji ke Mekkah (1988) ia juga memfilmkan kegiatan ibadahnya itu dan mempublikasikannya secara maksimal. Semasa memimpin, Adnan Menderes, yang dieksekusi oleh kudeta militer tahun 1960, direhabilitasi. Saat ini banyak jalan dan pusat perbelanjaan mencantumkan namanya.

kelanjutan dari PKN masa pra-1980, PK memiliki daya tarik tersendiri di mata publik terbatas dan memperoleh sedikit keberhasilan pemilihan pada masa Ozal. Namun setelah meninggalnya Ozal, partai tersebut memenangkan walikota/kotapraja yang diselenggarakan pada bulan Maret 1994.¹⁰ Selanjutnya PK memperoleh 21 % suara pada pemilihan parlemen Desember 1995, Jumlah suara yang lebih tinggi daripada yang diperoleh partai politik lainnya.

Partai AKP berdiri pada tanggal 14 Agustus 2001,¹¹ dideklarasikan oleh para kader partai yang tadinya tumbuh dan berkembang di bawah didikan Necmettin Erbakan, Erbakan yang juga seorang ilmuwan pernah tinggal di Jerman itu tak ubahnya guru politik beberapa kalangan muslim Turki. Kelahiran partai AKP juga merupakan bentuk komitmen Recep Tayyip Erdogan bersama teman-temannya se ide dengannya untuk menjadikan partai sebagai motor penting dalam permainan politik yang elegan bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai moral keislaman tanpa harus konfrontatif dengan pihak negara.

Erbakan sendiri di mata Erdogan adalah guru idola yang sangat ia hormati, bahkan ia kadang-kadang mencium tangan Erbakan sebagai bentuk penghormatan, meskipun pada kesempatan lain Erdogan memperotes itu sebagai simbol perbudakan, "Hand kissing as a symbol of slavery".¹² Benturan antara Erdogan dan Erbakan pernah terjadi pada tahun 1978 saat Kongres PKN. Ketika kongres berlangsung, Erdogan mencoba menggalang dukungan massa dari kader partai untuk mendukung langkahnya menduduki jabatan eksekutif partai, mencoba meruntuhkan kebijaksanaan Erbakan. Seperti pada akhir tahun 1970-an, ia mencoba memfokuskan diri pada aspek reformasi bidang politik pada internal partai dengan pendekatan politik modern daripada pendekatan spiritual pada tubuh partai

Pada tahun 1991,¹³ Erdogan tidak setuju dengan tindakan PK

¹⁰ Saat-saat dimana Recep Tayyip Erdogan memenangkan pikada Hal ini sekaligus menjadi titik balik karir politik Erdogan di belantika demokrasi Turki selanjutnya.

¹¹ "History of Justice and Development Party," dalam <http://www.akparti.org/eng>, akses pada tanggal 5 Januari 2014.

¹² Turan Yilmaz., *Tayyip: Kasimpasa' dan Siyasetin on Saflarianma* (Ankara: Umit.2001), dalam Martin Heper dan Sule Toktas, "Islam, Modernity, and Democracy in Contemporary Turkey: The Case of Recep Tayyip Erdoga," *The Muslim World*, Vol.93 (April 2003), hlm. 174.

¹³ Rentang waktu pra-1990-an Erdogan masih setia menggeluti karir politiknya bersama Erbakan, sehingga setiap kali partai Islam yang memiliki akar kuat dengan Erbakan berganti warna Erdogan tetap setia menjadi kader partai, evolusi PON, PKN, PK menjadi bagian dari proses politik partai Islam yang diikuti Erdogan.

berkoalisi dalam pemilihan umum dengan Partai Pekerja Nasional (Milyetci Calisma Partisi-MCP). Saat itu Erdogan menjadi salah satu petinggi partai. Akhirnya, sejak pertengahan tahun 1990-an sampai seterusnya, Erdogan secara terbuka mengkritik hegemoni Erbakan di institusi partai PK.

Pada kongres partai PK tanggal 14 Mei 1996, Erdogan menyerang dengan mengatakan bahwa kondisi yang ada di Turki, menghendaki pemimpin yang mendominasi harus segera disingkirkan oleh akar-rumput demokrasi, dan saat itu juga PK harus mencari pemimpin. Pada tahun 1998, dalam pidatonya di kota Trabzon bagian timur Laut Hitam, Erdogan menyatakan seseorang tidak lama lagi akan memberikan instruksi politik dari "menara gading". Sebagai bentuk dari pelarangan aktifitas politik bagi Erbakan, Erdogan lantas menyindirnya dengan ucapan, "Five years now Erbakan Would at most remain a sage" ("Lima tahun dari sekarang Erbakan hanyalah salah seorang guru kebijaksanaan").¹⁴

Ketika kondisi politik di Turki masih juga memiliki karakter yang tidak pernah berubah dengan berbagai serangan yang mengarah kepadanya, kebanyakan tentang tuduhan akan menjadikan Turki berbasis Islam dan anti-sekularisme, baik oleh pemerintah maupun pihak media massa, termasuk mengarah kepada partai, Erdogan merasa perlu ada langkah nyata untuk keluar dari "isolasi" sistemik yang dilancarkan oleh nalar kolektif sekuleris Turki.⁶⁶ Pada saat yang sama juga, ia berusaha berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk menebarkan nilai-nilai moral Islam kepada banyak orang. Ketika ia dihadapkan pada skisma politik di internal Partai Refah,¹⁵ ia memaparkan argumentasi bahwa hanya ada satu tujuan dalam politik yaitu usaha untuk menjunjung tinggi moralitas. Maka, ia dan beberapa orang kader partai mengusung semangat perubahan dengan "Gerakan Kebajikan" (Movement of the Virtuos, Erdemliler Hareketi) yang kemudian dikulminasikan dalam formasi politik partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan, Adalet ve Kalkinma Partisi, Justice and Development party) tanggal 14 Agustus 2001, partai ini diidentikkan sebagai partai reformis dalam bahasa Turki disebut Yeniliciler, Erdogan terpilih sebagai ketua umum, ketika partai AKP didekarasikan Erdogan menyatakan "AKP bukanlah partai politik poros eligius"¹⁶ Sebagai ikon pendiri partai selain Erdogan, Abdullah Gul

¹⁴ Martin Heper dan Sule Toktas, "Islam", hlm. 174.

¹⁵ Tahun 1997 menjadi akhir dari kepemimpinan Erbakan menduduki kursi perdana menteri, setelah militer melakukan kudeta sistemik. Kursi tersebut dicapai berkat koalisi dengan Partai Jalan Sejati (Trues Path Party) Tansu Ciller.

¹⁶ Dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/justice and Development Party \(Turkey\)](http://en.wikipedia.org/wiki/justice_and_Development_Party_(Turkey))", akses pada 5 Januari 2014.

juga memiliki peran penting dalam pendirian partai, disamping kader lainnya.

2. Tokoh AKP

Di tubuh partai AKP terdapat tokoh penting yang menjadi ikon penggerak partai ini, tokoh-tokoh yang ada di internal partai merupakan orang-orang yang sejak awal memiliki komitmen kuat untuk mendirikan partai dan berjuang atas nama keyakinan ideologis mereka dengan didukung oleh kesamaan pandangan di antara mereka, diantara tokoh-tokoh itu menurut hemat penyusun ada dua orang tokoh penting yang memiliki peran dominan yakni Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gul.

Recep Tayyip Erdogan, lahir pada tahun 1954 di kasimpasa, sebuah kawasan penduduk kelas menengah ke bawah kota Istanbul.¹⁷ Ayahnya adalah seorang nahkoda sebuah Agen Kelautan milik negara dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Untuk membantu pemasukan keluarga Erdogan kecil adalah penjual lemon, rempah-rempah, roti dan juga air minum di jalanan. Sehingga ia cukup familier dengan kehidupan rakyat kecil dengan beragam kesusahan yang ada di dalamnya, sekaligus kelak menjadi salah satu kantong suara yang membawa diri dan partainya memenangi pemilihan kepala daerah. Inspirasi hidupnya banyak dipengaruhi oleh empat faktor: Ayah, Kasimpasa, Guru, dan Sufisme.

Sebelum memasuki dunia politik Erdogan termasuk beruntung karena mengenyam pendidikan modern dengan karir cemerlang. Setelah menyelesaikan pendidikan di Imam Hatip School (setingkat SMA di Indonesia), ia meraih gelar B.A. dari jurusan Ekonomi dan Perdagangan Universitas Marmara di Istanbul tahun 1980. Selain menguasai bahasa ibu, ia juga dikenal mampu berbahasa Arab dan Inggris. Ia pernah bekerja sebagai Eksekutif Manajer di beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang penjualan makanan.

Ketertarikannya dengan dunia politik dan bisnis berawal sejak ia masih sangat muda, pada usianya yang ke 15 pada tahun 1969 Erdogan telah bergabung dengan National View Association (Milli Gorus Teskilati), sebuah lembaga underbouw aktor intelektual baik untuk Partai Orde Nasional (PON)/ National Order Party ataupun Partai Keseamatan Nasional (PKN)/ National Salvation Party (MSP). Tidak lama berselang ia kemudian dipercayakan untuk memimpin divisi pemuda partai MSP untuk daerah atau distrik Beyoglu di Istanbul. Pada tahun 1984, ia menjadi ketua umum Partai Kesejahteraan/Welfare Party (Refah Partisi) cabang

¹⁷ Martin Heper dan Sule Toktas, "*Islam, Modernity*," hlm. 157; "Recep Tayyip Erdogan (Istanbul 1957-)" terdapat juga pada tulisan Burak Sansal dalam <http://:allaboutturkey.co>, akses tanggal 5 januari 2014.

¹⁷ Martin Heper dan Sule Toktas, "*Islam, Modernity, and Democracy*.." hlm. 164.

Beyoglu. Pada tahun berikutnya ia dipercayakan untuk menduduki jabatan administratif Partai Kesejahteraan di tingkat Provinsi Istanbul. Pada tahun 1986, Erdogan terpilih menjadi ketua umum Partai Kesejahteraan/Refah Partisi di Istanbul. Pada tahun 1989 ia dicalonkan menjadi kepala daerah di daerah pemilihan Beyoglu dengan mobilisasi politiknya Partai Kesejahteraan/Refah Partisi, meski kalah namun bagi Partai Refah adalah sebuah kemenangan tertunda dengan indikasi perolehan suara yang meningkat cukup signifikan jika dibanding dengan pemilihan sebelumnya. Pada pemilihan kepala daerah tahun 1994, Erdogan kembali dicalonkan untuk jabatan yang lebih tinggi yakni walikota metropolitan Istanbul. Dengan keyakinan tinggi akhirnya Erdogan bersama Partai Refah mampu mengungguli kandidat lain dari tokoh penting nasional.

Kemampuan pada bidang manajemen cukup membantu dalam membenahan partai yang dipimpinnnya, ia selalu berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Ia berhasil membawa angin segar perubahan pada tubuh partai, baik pada struktur politik maupun kultur yang bersih yang ingin dibangun. Termasuk ketika menjabat sebagai walikota Istanbul, Erdogan mampu mengubah kota itu menjadi lebih cerah, bersih berkembang pesat dengan infrastruktur memadai. Pada tahun 1998 oleh Komisi Pemilihan Umum (Super Election Board) membekukan kekuasaannya sebagai kepala daerah, karena dianggap telah berbuat inskonstitusional di depan publik, ia dituduh menebar kebencian SARA, "menebar kebencian keagamaan" di muka umum, "kejahatan melawan negara". Dalam pidato politiknya, ia mengutip puisi karangan Ziya Gokalp, "bapak nasionalisme Turki" yang mengatakan "the mosques are our barracks, the domes are our helmets, the minarets our bayonet, and faithul our soldiers" ("masjid adalah barakku/ kubah adalah topi bajaku/ menara bayonetku dan iman adalah serdaduku").

Meskipun di Turki kutipan seperti ini banyak ditemukan di buku-buku pelajaran sejarah. Akibat perbuatan tersebut Erdogan yang juga pernah menjuarai lomba debat di sekolah dan menjuarai lomba membaca puisi di Istanbul tahun 1973, kemudian dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh bulan dan tidak diperkenankan melakukan aktifitas politik, namun tidak lama seteah itu, sekitar empat bulan, ia dibebaskan karena dianggap telah beriktikad baik selama menjalani hukuman. Di penjara, Erdogan banyak bergaul dengan para narapidana mendiskusikan banyak hal tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan untuk membawa Turki lebih baik, di sana ia juga bagaikan seorang martir sejarah dengan dukungan ribuan pendukung, di penjara tanpa ada rasa sedih, ia kemudian mengindentikan dirinya sebagai "Nelson Mandela milik Turki".⁷²

Setelah keluar dari penjara tidak membuat bapak dari empat anak ini lunak, ia malah semakin berani namun tetap elegan, bermain politik secara jantan menunjukkan kepada publik bahwa ia adalah politisi sejati yang selalu taat akan aturan hukum. Sikap taat hukum tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh karakter yang terbangun sejak usia muda. Erdogan yang juga pemain sepak bola profesional ketika masih muda, saat diminta untuk ikut melakukan aksi protes terhadap pemerintah, ia menolak karena menurutnya hal itu tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Dari riwayat hidupnya, terekam bahwa ia adalah sosok dengan karakter keislaman yang kuat, ia mencoba menegaskan identitas diri sebagai muslim dan dalam batas-batas tertentu mengikuti alur pemikiran elit sekularisme, Nuran Yildiz dari Universitas Ankara memiliki kesan terhadap Erdogan sebagai sosok yang "berteman dengan surga, hidup dengan hati nurani, hatinya terisi penuh dengan puisi-puisi, dan menjadi wacana simbolis". Ia seringkali menggunakan terminologi Islam atau kalau tidak substansi Islam untuk mengekspresikan kehidupan sehari-harinya. Kepindahan bersama ayahnya dari kawasan Laut Hitam bagian utara Turki ke Istanbul diasosiasikan sebagai sebuah hijrah (*hicret*), emigrasi seorang nabi (Muhammad) dari Makkah ke Madinah 622 SM untuk menghindari serangan musuh-musuh. Ketika menjabat sebagai walikota Istanbul, ia mengumumkan dirinya sebagai seorang imam kota itu. Ketika dikritik oleh sejumlah kalangan ia menepisnya dengan alasan (bagi seorang *imam* dalam kesehariannya di Turki adalah sebuah proses ibadah seorang pemimpin), Erdogan menegaskan, "ketika anda mendengar kata *imam*, anda hanya berfikir tentang seorang yang memimpin ibadah sholat di masjid. Dalam Islam, *imam* adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengatur atau memimpin". Tidak hanya itu, dalam setiap awal sesi pembukaan di kantor administrasi walikota, acara selalu dibuka dengan menggunakan *Fatihah*. Aneksasi simbol-simbol Islam terkadang oleh banyak pihak disalahartikan dan disalahgunakan untuk memahami karakter Islam Erdogan.¹⁸

Abdullah Gul, lahir di Kayseri pada tahun 1950. Lulus dari Istanbul University menyandang gelar B.A. pada bidang ekonomi tahun 1971, kemudian meraih gelar Ph.D. dari universitas yang sama pada tahun 1983. Ia juga menyempatkan menempuh ilmu di Exter dan London.

Pada yayasan Sarakarya University Industrial Engineering Departement. Ia mengajar mata kuliah bidang ekonomi antara tahun 1980-1983. Dari tahun 1983 sampai 1991 ia bekerja sebagai pakar ekonomi di Islamic Development Bank, Jeddah. Ia juga termasuk salah

¹⁸ *Ibid.*

satu anggota Associate Professor on International Economics tahun 1991.

Tahun 1991, ia terpilih sebagai salah satu anggota Parlemen dari Partai Refah. Menjadi anggota Komisi Perencanaan dan Penganggaran di Parlemen. Pada tahun 1993, ia ditunjuk sebagai Deputy Ketua Partai Refah untuk urusan Luar Negeri (*Foreign Affairs*). Pada tahun 1995 ia kembali terpilih menjadi anggota parlemen. Menjadi anggota komisi urusan luar negeri. Dari tahun 1996 sampai tahun 1997, dipercaya memegang jabatan Menteri Negara dan Pemerintah merangkap Juru bicara.

Pada tahun 1999, ia terpilih kembali untuk ketiga kalinya menjadi anggota parlemen namun dari Partai Kebajikan (*Virtue Party*). Dari tahun 1992 sampai tahun 2001 menjabat sebagai Anggota Komisi Parlemen Dewan Eropa (*Parliamentary Assembly of the Council Europe*). Menjabat selaku anggota Komite Parlemen bidang Kebudayaan, Pendidikan dan Politik untuk Dewan Eropa (*Committee on Culture and Education and Political Committee of the Council of Europe Parliamentary Assembly*). Pada tahun 2001 ia dianugrahi Penghargaan Pro-merito oleh Dewan Eropa dan menjadi anggota Kehormatan pada Asosiasi Perhimpunan Parlemen Dewan Eropa.

Pada bulan Agustus, bersama Erdogan ia mendirikan Partai AKP. Ia ditunjuk oleh presiden Ahmet Necdet Sezer menjadi Perdana Menteri Turki yang baru pada tanggal 16 November 2002. Pada tanggal 19 November, 25 anggota kabinetnya dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pemerintah yang baru meraih kemenangan dengan suara meyakinkan di Parlemen Turki (TBMM) pada 28 November 2002.

Setelah larangan untuk melakukan aktifitas politik bagi rekannya Erdogan, Gul kemudian meletakkan jabatan Perdana Menteri. Selama di lingkaran Pemerintahan ke 59 Turki, ia pernah menduduki jabatan Menteri Luar Negeri, Anggota Parlemen, Dewan Pimpinan AKP bidang politik dan hukum, dan juga termasuk salah satu anggota Perhimpunan Parlemen NATO.

Pada bulan Agustus 2007, ia dipilih oleh mayoritas Parlemen sebagai Presiden Republik Turki ke 11. Berbeda dengan Erdogan, Gul termasuk sosok yang memiliki karir cemerlang di bidang politik, ia tidak banyak mendapat sorotan dan permusuhan berlebihan jika dibandingkan dengan yang dialami Erdogan, namun keduanya memiliki kesamaan pandangan dalam hal modernisasi nilai-nilai keislaman dalam konfigurasi perpolitikan di negeri yang telah menyalahartikan dan menyalahgunakan konstitusi warisan Kemalisme-Turkisme oleh sebagian besar elit mereka.

3. Ideologi Politik AKP

Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) berupaya menjauhkan dirinya dari identitas partai Islamis, yang kemudian mengarakteristikkan dirinya

sebagai partai konservatif-demokrat. Ia menunjukkan bahwa dukungannya pada ekonomi pasar bebas dan pandangan konservatifnya pada nilai moral yang disesuaikan dengan karakter partai kristen demokrat di eropa.

Doktrin konservatif sendiri tidak harus selalu diasosiasikan dalam agenda kebijakan partai politik untuk menampakkan 'bendera' konservatif, maka ia harus menjauhkan diri dari kebijakan progresif seperti apa yang diistilahkan oleh partai modern konservatif yang dikembangkan oleh Edmund Burke (1790-1791). Dalam dua bukunya "*Reflection on the Revolution in France*" (1790) dan "*An Appeal of the New Whigs to the Old*" (1791), Burke menyatakan doktrin konservatifnya memiliki akar sekuler dibanding religius dan skeptis dibanding ideologis, dengan demikian ia anti rasionalis. Nilai konservatif yang dicirikan AKP hampir serupa dengan paham konservatisme tersebut. Seorang intelektual Muslim Ali Burac mengatakan, bahwa yang membuat para pemilih dari berbagai kalangan memilih AKP ialah karena identitas religius dan konservatif partai ini.

Identitas tersebut adalah suatu bentuk Islamisme 'baru' yang tidak pernah terucap, tapi lebih dikenal dengan demokratik-konservatif. Ideologi AKP yang diumumkan secara resmi mengatakan, bahwa apa yang masyarakat Turki pahami dari konservatisme tidak lebih dari menghargai dan mentaati nilai-nilai spiritual dan religius. Satu dari juru bicara utama AKP, Dengir Mir Mehmet Firat, mengelaborasi lebih lanjut karakteristik yang dipresentasikan AKP: "An Understanding of conservatism that does not carry the past into today; yet its roots are establish in the past, its face is turned to the future, contemporaneous and novelty seeking in essence, so that it provides for the co-existence of the local and the universal, tradition and modernity, and produces change while preserving continuity and thus seek (ing) the objective of opening up to the contemporary world".¹⁹

Apa yang Firat argumentasikan, menunjukkan bahwa AKP berada pada konservatisme, namun menekan dan menghargai perubahan. Artinya, jika latar belakang ideologi spektrum 'kanan' di Turki meliputi ekspektasi peningkatan mobilitas sosial ke atas, perbaikan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, maka AKP menggabungkannya dengan

¹⁹ "AKP MUHAZAFKAR -LIK VE DEMOKRASI SEMPOZYUMU", 11 January 2004, http://akaparty.org.tr/hrb_1.asp?haber_id=6550&kategori3. Dikutip dalam E. Fatih Bilge, "The Venture of AKP for the Search of it-Self Identity", dalam Ersin Kalaycioglu, "Politics of Conservatism in Turkey", Turkish Studies, Vol. 8 No. 2, June 2007, hlm. 240.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 240.

ketertiban moral dalam masyarakat agrikultur beserta nilai-nilai tradisionalnya, dimana religiusitas memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding parokialisme dan nasionalisme.

Sejak Republik tersebut memperkenalkan sistem multi partai, persaingan konstalasi politik sudah terlihat signifikansinya. Kecuali pada masa kekuasaan militer, persaingan sudah terlihat antara partai Tengah-Kiri Cuhuriyet Halk Partisi (CHP) berkuasa dengan partai Kanan-Tengah. Pergantian kekuasaan antara dua kubu partai dalam perjalanannya semakin memperlihatkan budaya politik bangsa Turki dan partai dengan ideologi apa yang sesuai dengannya. Kebangkitan AKP menunjukkan budaya politik bangsa Turki sebagai gabungan yang khas antara keinginan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kesejahteraan sosial, bersamaan dengan romantisme nilai tradisional dan religius dari masa lalu masyarakat agraris yang tenggelam bersamaan dengan kemunculan Republik Turki, telah membentuk budaya politik bangsa Turki.

Untuk itu dalam perkembangannya, hanya dengan gerakan politik yang mencakup gabungan nilai tersebutlah yang mampu menjangkau pluralitas masyarakat Turki. Suatu partai yang dapat mempertahankan ketertiban moral di satu sisi, sementara menghasilkan perkembangan yang sangat pesat dalam kesejahteraan sosio-ekonomi di sisi lainnya.

AKP tampil dengan menggabungkan dua konsep yang menggiring kemunculan "demokrasi" dan "konservatisme" dalam politik Turki. Konservatisme seringkali digunakan dalam mendefinisikan doktrin politik seseorang pemimpin politik, gerakan dan partai politik yang muncul sebagai sebuah kode politik yang mempresentasikan ideologi sayap-Kanan dalam spektrum ideologi politik Turki.²⁰ Gerakan sayap-Kanan tampil sebagai pemilik ideologi konservatif dan sebagai tuan rumah dari sejumlah sifat, prefensi dan kepentingan masyarakat Turki. Di Turki, konservatisme menitikberatkan pada ketaatan religius, adat sosial, tradisi, di atas inferensi rasional dan argumantasi

logis dalam membangun institusi dan praktek kehidupan sosial-politik. Beberapa pengamat juga berargumen, bahwa pemahaman Kemalis mengenai sekulerisme terbatas pada batasan antara keyakinan personal dengan ekspresinya di ruang publik. Disadari atau tidak, pemahaman ini yang kemudian menjadi akar permasalahan sekulerisme di Turki.

Perlu ditekankan, bahwa sebagian besar pendukung ideologi konservatisme Turki beragumen bahwa motif utama konservatisme ialah untuk mempertahankan yang lama melawan yang baru, masa lalu melawan masa depan, Timur melawan Barat, tradisi melawan gangguan dari

²⁰ *Ibid.*, hlm. 234.

modernisme. Di sini terlihat bahwa konservatisme Turki mendapatkan inspirasinya dari masa lalu Islamis-Ustmani Turki, yang seringkali muncul sebagai kebangkitan romansa budaya dan pandangan masa kejayaan tradisi, Islamis Ustmani dan adat Turki. Di bawah keadaan ini, konservatisme Turki menjadi tidak lebih dari upaya sistematis untuk mencegah "tradisi, budaya, agama, dan seluruh institusinya keluar dari sumber asalnya."²¹

Atas dasar tersebut, maka dapat dipahami beberapa alasan yang dapat menjelaskan alasan kemunculan AKP sebagai sebuah pengecualian kebangkitan partai konservatif dalam sejarah politik Turki. *Pertama*, ciri yang melekat pada AKP sebagai partai tradisional-religius-konservatif, dan dengan demikian dapat terikat kuat dalam ikatan konservatisme politik Turki.⁹¹ Hal tersebut yang menjadi alasan AKP untuk membangun kekuasaan satu partai yang lebih efektif dalam proses pembuatan kebijakan. Menguasai mayoritas parlemen, AKP dapat mengubah perundangan dan menetapkan peraturan baru dengan sepenuhnya, termasuk amandemen signifikannya terhadap konstitusi Turki yang sebelumnya dikarakteristikan oleh uni eropa (UE) "anti-demokratik dan anti hak asasi manusia.

Kedua, tuntunan UE akan demokratisasi dan demiliterisasi dalam kehidupan politik Turki serta sikap hormat terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang AKP dan partai yang berorientasi Islam lainnya telah diadvokasikan selama bertahun-tahun sebelumnya. Dengan jaminan UE, AKP berjalan satu langkah lebih maju dibanding pendahulunya dikarenakan partai tersebut mampu menunjukkan suatu proses perubahan institusional dan ideologis dalam politik Islam Turki. Alasan *Ketiga*, karena AKP turut mempresentasikan suatu keyakinan utama lainnya, dimana tidak ada satupun dari partai sebelumnya yang memiliki hubungan dekat dengan komunitas kewirausahaan konservatif dan perusahaan (Lions of Anatolian) serta organisasi mereka, MUSIAD.²²

Kapital Anatolian yang mengeluh telah diperlakukan tidak adil dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh perusahaan besar Turki dan rekan internasionalnya, kemudian melihat AKP sebagai kesempatan kebangkitan mereka, untuk itu mereka pun menjadi pendukung kemunculannya.²³ Program ekonomi AKP fokus pada restrukturisasi

²¹ *Ibid.*, hlm. 236.

²² MUSIAD adalah organisasi wirausaha yang didirikan pada mei 1990 di Istanbul oleh

sekelompok wirausahawan yang dikenal dengan ketaatan pada keyakinan dan praktek reigius mereka. Hal tersebut yang membedakannya dengan asosiasi wirausahawan pro-sekuler yang dikenal dengan TUSIAD (Association of Turkish

sektor keuangan dan penghapusan hambatan pertumbuhan sektor privat. Selain itu AKP juga memberikan kesan kepada masyarakat konservatifnya sebagai partai yang mendukung perubahan ekonomi. Mereka juga meyakinkan masyarakat, bahwa meskipun seorang kader AKP tumbuh dalam lingkungan tradisional-konservatif negara, tapi partai ini siap menghasilkan massa dengan ikatan tradisional, namun juga dengan keuntungan

ekonomi. Prospek terhadap perubahan ekonomi yang dapat menguntungkan *Lions of Anatolian* dan masa konservatifnya terlihat menghasilkan dukungan kuat, mencegah identifikasi yang mengancam keberadaan AKP dan turut menggiring kebangakitan AKP dalam politik Turki.²⁴

C. Strategi AKP dalam Perubahan Sosial Politik di Turki

1. Hubungan Sipil-Militer

Pada masa Perdana Menteri Erdogan, upaya untuk membangun kontrol sipil secara *de jure* dipertegas dengan disahkannya Paket Demokratik Agustus 2003 (*August 2003 Democratic Package*). Paket reformasi tersebut adalah bagian dari komitmen Turki untuk mensejajarkan hubungan sipil-militernya dengan persyaratan yang diajukan UE. Paket tersebut meliputi beberapa amandemen pasal undang-undang DKN (*Dewan Keamanan Nasional, Milli Guvenlik Kurulu*), yang mencakup:

- a. Mengganti Kekuasaan eksekutif DKN yang tumpang tindih atau yang bercabang ke dalam badan penasihat.
- b. Meningkatkan jumlah anggota sipil dalam DKN dan memberikan mereka hak mosi.
- c. Mereduksi cakupan peran Seketaris Jenderal DKN dengan menghapuskan peraturan sebelumnya yang mewajibkan seluruh Menteri, institusi publik, organisasi, dan jabatan badan hukum lainnya untuk meyerahkan berbagai informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh Seketaris Jenderal Dewan, baik secara rutin ataupun jika diminta.
- d. Mengubah prosedur penunjukan Seketaris Jenderal DKN dan menjadikannya dikuasai oleh persetujuan Presiden dan didasari pada proposal yang diajukan oleh Perdana Menteri. Perubahan ini juga mengizinkan individu yang bukan berasal dari kalangan militer untuk menjadi Seketaris Jenderal. Pandangan Kepala Jenderal Staf hanya akan ditindak lanjuti jika terkait dengan penugasan anggota TAF (*Turkish*

Industrialists and Businessmen). Lihat Ersin Kalaycioglu, "Politics of Conservation in Turkey", *Turkish Studies*. Vol. 8. No. 2, June 2007., hlm. 250.

²⁴ Ersin Kalaycioglu, "Politics of Conservation in Turkey", *Turkish Studies*. Vol. 8. No. 2, June 2007., hlm. 250.

Armed Forces, Turk Silabli Kuvvetleri).

- e. Mengurangi jumlah departemen yang berada dibawah otoritas Seketaris Jenderal dari sebelas menjadi tujuh, bersamaan dengan pemerataan jumlah personel di tiap departemen.
- f. Mengurangi jumlah pertemuan DKN dari tiap bulan sekali, menjadi dua bulan sekali.
- g. Mengizinkan, meskipun tidak sepenuhnya, kewenangan parlemen untuk memeriksa anggaran militer.
- h. Menurunkan anggaran militer hingga 60 persen.

Walaupun pemerintah Turki telah menciptakan langkah reformasi yang signifikan dengan mengamandemen seperangkat konstitusi dan mengesahkan Paket Demokratik, namun pada akhirnya, implementasinya adalah indikator yang paling mendasar dan bekerja sebagai tantangan yang sesungguhnya. Terdapat sejumlah bukti, yang menunjukkan bahwa pemahaman keamanan militer tidak sepenuhnya menyambut baik reformasi tersebut. Karena pada dasarnya, tingat dan bentuk kontrol sipil tergantung pada bentuk sistem pemerintahan, tradisi sejarah, nilai budaya, dan berbagai persepsi terhadap ancaman.

Pejabat militer utamanya mengkhawatirkan keputusan paket reformasi yang mengubah DKN ke badan penasihat sepenuhnya dan menjadikan pengeluaran anggaran militer diatur secara terbuka akuntabilitasnya dalam proses politik. Kepala penasihat untuk Seketaris Jenderal DKN juga menentang legislasi baru dalam paket reformasi, dan mengklaim bahwa paket tersebut telah menghapus peran eksekutif dalam DKN secara bersamaan. Selain itu, meskipun beberapa pertimbangan terhadap militer harus didasarkan pada paket reformasi, dan mengklaim bahwa paket tersebut telah menghapus peran eksekutif dalam DKN secara bersamaan. Selain itu, meskipun beberapa pertimbangan terhadap militer harus didasarkan pada paket reformasi, seperti anggaran belanja militer yang akan diawasi akuntabilitasnya, namun pada praktiknya hal tersebut hanya berlaku sebagaian. Dalam arti, proses audit tetap dilakukan secara rahasia oleh *Court of Account*²⁵ Lebih lanjut, pemerintah PM Erdogan dipaksa berkompromi untuk menunda keputusannya selama satu tahun ketika hendak menunjuk warga sipil untuk ditempatkan sebagai Seketaris Jenderal DKN.

Sejumlah fakta tersebut semakin membuktikan, bahwa dalam perjalanannya, Paket Demokratik Agustus 2003 menyisakan berbagai cara bagi militer untuk mengelak dari kontrol sipil. Menteri pertahanan tidak

²⁵ "Ok to the 7th Adjustment Package," *Hurriyet* (Turkish Daily), 30 July 2003. Dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 278.

dapat menggunakan kekuatannya di atas Kepala Jenderal Staf. Meski secara formal Perdana Menteri (PM) memiliki kekuatan untuk mengeluarkan veto terhadap promosi jabatan dan pensiunan militer, namun dalam praktik dan didukung oleh tradisi, militer tetap menjaga otoritasnya terhadap berbagai isu yang menyangkut personilnya. Pejabat militer yang menggantikan posisi Jenderal Hilmi Ozkok sebagai Kepala Jenderal Staf, Jenderal Yasar Buyikanit menunjukkan suaranya dengan mengkritik kurangnya upaya pemerintah dalam menangani ancaman keamanan negara. Dalam beberapa kesempatan, tanpa merundingkannya dengan pemerintah, Jenderal Buyinkanit mengekspresikan ketidaksepakatan dengan pemerintah PM Erdogan terkait kebijakan terhadap Siprus, utara Irak, dan Kurdi Turki.²⁶

Ketidakkampuan pemerintah sipil untuk mengawasi peluang intervensi militer dalam arena politik menunjukkan kegagalan reformasi institusi sipil militer, baik dalam melepaskan beberapa mekanisme informal ataupun dalam membangun kontrol sipil di atas cara bekerja militer, dimana mereka bisa memberikan pengaruhnya pada proses kebijakan. Dalam perjalanannya, militer tetap menggelar beberapa 'pertemuan terorisme DKN', yang menandakan bahwa militer mulai terpanggil untuk rapat, sekalipun reformasi telah menetapkan pengurangan pengaruh DKN dalam mengadakan pertemuan. Sikap ini adalah salah satu contoh hambatan formal militer terhadap peran keamanan nasionalnya. Militer dengan sifat "Deep State Turki" menunjukkan daya tahannya pada upaya untuk menggeser bentuk negara terpusat serta mahir dalam menghindari pemeriksaan demokratis.

Meskipun secara konstitusional DKN merupakan badan penasihat, dalam kenyataannya di sebagian besar isu penting, termasuk apapun yang tidak ada relevansinya dengan keamanan nasional, juga turut dirundingkan dalam DKN dan rekomendasinya memiliki pengaruh politik yang kuat. Komandan militer kerap mengeluarkan pernyataan politik terkait isu domestik maupun luar negeri, terkadang berkoflik dengan beberapa otoritas sipil. Sebagian besar dari beberapa petentangan ini menyulitkan peluang Turki untuk bernegosiasi dengan utara Irak dan otoritas regional Kurdi untuk mengakhiri aktivitas teror PKK (*Workers Party of Kurdistan, Partiya Kerkoran Kurdistan*). Sementara PM Erdogan dan Menteri Luar Negeri Abdullah Gul memilih untuk melakukan perundingan, Kepala Jenderal Staf Yasar Buyikanit menolaknya. Ketika PM Erdogan

²⁶ Evren Degler, "Byunkanit Move was pre-Planned," *The New Anatolian*, 10 March 2006. Dikutip dalam Marcie J. Patton, "Turkey's Tug of War," *Middle East Report*. No. 239. Dispatches from the war Zones: Iraq and Afganistan (Summer 2006), hlm. 46.

menyatakan bahwa penolakan Buyukanit hanya bersifat pendapat pribadinya, Kepala Staf lainnya menanggapi dengan mengatakan bahwa pernyataan Buyukanit adalah representasi dari 'pandangan institusi' muter, bukan pendapat pribadi. Sikap tersebut menggambarkan bahwa pernyataan yang berkonflik antara sipil dengan militer adalah suatu hal yang biasa dalam politik Turki.

Reformasi konstitusional dan legislatif yang diperkenalkan PM Erdogan terlihat menghilangkan sebagian besar warisan semi-otoriter dari DKN, yang disimpulkan oleh komisi Uni Eropa (UE) bahwa Turki telah cukup memenuhi 'kriteria politik Kopenhagen'. Atas pertimbangan tersebut, Dewan Eropa kemudian memutuskan untuk memulai negosiasi aksesinya pada 17 Desember 2004. Terlepas dari itu, sesungguhnya upaya Turki untuk membangun kontrol sipil demokratis sudah tertuang dalam teks konstitusi 1982. Dalam pasal 117, menetapkan bahwa Kepala Jenderal Staf harus ditunjuk oleh Presiden Republik, di atas proposal Dewan Kementrian, bahwa Dewan Kementrian bertanggung jawab pada Dewan Majelis Nasional untuk mengelola keamanan nasional dan mempersiapkan angkatan bersenjata untuk pertahanan negara, dan anggaran pertahanan dikuasai oleh persetujuan dari Dewan Majelis Nasional sebagaimana departemen lainnya di dalam pemerintahan. Hal ini menyimpulkan, bahwa dari sudut pandang *de jure*, tidak diperdebatkan lagi bahwa militer Turki ditundukkan dalam otoritas kontrol sipil.

Namun, pada kenyataannya situasi *de facto* berbeda dengan *de jure*. Secara *de facto*, militer Turki tetap menikmati otonomi dan pengaruh politiknya diluar pemahaman demokratis. Militer mendapatkan otonomi institusi sepenuhnya dalam mengatur doktrin kemiliteran, pendidikan, penunjukkan, promosi jabatan, produksi persenjataan dan perolehannya, serta prioritas anggarannya. Walaupun anggaran pertahanan berada di bawah persetujuan parlemen, pada praktiknya hal tersebut selalu disetujui secara aklamasi tanpa adanya perdebatan di parlemen. Hal ini adalah bukti bahwa otonomi militer tidak hanya diabaikan secara institusional, tetapi juga diperluas ke wilayah budaya politik.

Di samping itu, militer yang memiliki tingkat popularitas tinggi dalam masyarakat Turki mengindikasikan besarnya legitimasi yang dimiliki militer dalam masyarakat. Dengan demikian dapat didasari bahwa kunci utama Turki untuk dapat menciptakan stabilitas politik ialah membangun hubungan yang korporatif antara tiga rekan (militer, elite politik, dan masyarakat) yang tidak mensyaratkan pemisahan, dalam mencapai tujuan nasional mereka suatu hubungan yang korporatif diantara ketiganya setidaknya dapat dibangun dengan sejumlah dialog, akomodasi, dan

berbagai nilai dan tujuan di antara militer, elite politik, dan masyarakat.²⁷ Jika ketiga rekan dapat mengintegrasikan kepentingannya dan membuat kesepakatan mengenai nilai, tujuan dan bentuk interaksi antara sipil, militer, dan masyarakat, bukan tidak mungkin dikemudian hari konflik sipil dengan militer pun akan berkurang.

Teori demokratik yang mensyaratkan penundukan militer pada otoritas sipil, didasari oleh pengalaman Amerika Serikat dan menganggap bahwa pemisahan institusional harus dipraktikkan di seluruh negara untuk menghindari intervensi politik militer. bagaimanapun juga pengalaman Amerika Serikat berasal dari pengalaman sejarah dan budayanya sendiri, untuk itu tidak dapat berlaku pada negara lain. Demikian halnya dengan Turki yang memiliki pengalaman dan nilainya tersendiri tentu menjadi persoalan jika harus disesuaikan dengan tatanan pemerintahan demokratis sebagaimana pengalaman Amerika Serikat. Di Turki, persoalan tersebut berakar pada masa awal munculnya perpecahan antara birokrasi militer dengan sipil terpiih. Militer tidak hanya melihat dirinya sebagai pengawal dari negara kesatuan dan sekuler, namun juga sebagai kepala agen dari proyek modernisasi Turki.²⁸ Semacam sikap pengawasan mereka yang menggiringnya untuk melihat otoritas sipil sebagai institusi dan aktor yang tidak stabil, tidak efisien, kurang memiliki kepedulian, tidak bijaksana, populis, korup, dan tidak bertanggung jawab terhadap persoalan negara.

Indikator ancaman yang ditentukan militer kemudian menghasilkan jalan buntu bagi rejim hingga berbagai macam ungkapan, artikulasi, mediasi kepentingan, dan resolusi konflik yang diajukan partai politik atau kelompok kepentingan dipandang militer sebagai gangguan. Konsekuensinya, meskipun militer menerima legitimasi demokratis dan peran sipil, militer tetap menggunakan konstitusi legal, sejarah budaya, dan alasan struktural serta mekanisme untuk mempertahankan posisi istimewanya, baik dalam mengeluarkan tuntutan, usulan kebijakan atau peringatannya terhadap masalah politik.³⁴⁰

Untuk itu, tingkat pengaruh politik militer Turki tergantung persepsi mereka terhadap ancaman. Militer dalam perkembangannya, sensitif terhadap gerakan Islamis dan separatis Kurdi yang mereka pandang sebagai 'garis keras'. Dalam pandangan mereka, kesatuan negara bangsa dan sistem pemerintahan sekuler adalah karakteristik Republik Turki yang tidak dapat diubah dan memiliki dasar pokoknya dalam Revolusi Kemalis. Maka sejauh persepsi tersebut ada, maka militer akan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ergun Ozbudun, "State Elite and Democratic Political Culture in Turkey," dalam Larry Diamond (Ed.), *Political Culture and Democracy in Developing Countries*, (Boulder and London: Lynne Renner Publisher, 1994), hlm. 189-210.

terus mengerahkan peran pengawalan dan mengasosiasikan hak istimewa mereka. Di satu sisi, militer Turki tidak mungkin membuka panggung kudeta, jika apa yang mereka pandang sebagai 'garis keras' tidak sungguh-sungguh mengancam.²⁹

Demikian halnya dengan militer pada masa PM Erdogan. Namun suatu hal yang membuat masa ini berbeda dari kepemimpinan sipil sebelumnya pasca pemerintahan Ataturk dan Inonu ialah sikap sipil yang 'kompromistis' terhadap militer, khususnya dalam menanggapi lingkungan ancaman. Pada tahap pertama, ketika militer menegaskan penghormatannya pada sipil. Sikap tersebut terlihat PM Erdogan mengisyaratkan kesiapannya untuk melakukan perundingan sebelum militer memberikan persetujuannya terhadap 'Rencana Annan'. Dalam mengeluarkan pernyataan mengenai konflik Siprus, PM Erdogan dalam menangani status Siprus juga dikarenakan pertimbangan mereka yang tidak ingin mengintrupsi proses keanggotaan Uni Eropa.

Hal yang serupa juga terjadi ketika pemerintah menanggapi ancaman investasi Amerika Serikat ke Irak. Dalam proses penentuan keputusan apakah akan mengabulkan permohonan Amerika Serikat, pemerintahan menunda pemungutan suara di parlemen hingga suatu keputusan dikeluarkan oleh DKN, dan sehari sebelum pemungutan suara parlemen, Erdogan menghadap pimpinan militer dan memohon mereka untuk mengeluarkan pernyataan publik yang mengizinkan pengesahan hasil parlemen. Hal ini dilakukan Erdogan untuk memperkuat keputusannya dalam mengabulkan permohonan Amerika Serikat. Dengan lingkungan ancaman yang seharusnya menghasilkan kontrol sipil yang 'kuat' namun pada kenyataannya tidak menunjukkan hal yang demikian. Meskipun kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani konflik Siprus dan invasi Amerika Serikat ke Irak preferensi sipil unggul dari militer, namun sipil mendapatkannya dengan mengompromikannya terlebih dahulu pada militer.

Sementara dalam tahap kedua, pemerintahan sipil bersatu dengan militer dalam menangani ancaman Kurdi. Pemerintah menyerahkan dan mendukung solusi keamanan militer dalam penanganan pemberontakan Kurdi. Hal tersebut terbukti bahwa tidak hanya Perdana Menteri yang memperingatkan representatif Kurdi untuk tidak menentang rancangan undang-undang keamanan. Tapi sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Abdullah Gul, yang tidak menunjukkan kesalahannya

²⁹ Ergun Ozbudun, "Civilian Control of the Military: Why and What?," *Strasbourg: European Commission for Democracy Through Law, (Venice Commission)*. (September 2007), hlm. 6.

mengenai pemahaman keamanan ini, dengan mengatakan "jangan lupa bahwa kebebasan tidak dapat dinikmati tanpa rasa aman". Untuk itulah, pada tahap kedua, ketika lingkungan ancaman seharusnya menunjukkan bentuk kontrol sipil yang 'lemah', sipil justru bersatu dengan militer untuk menangani ancaman Kurdi.

Hubungan yang kompromistis antara pemerintah sipil dengan militer dalam menanggapi ancaman sebagaimana diperlihatkan PM Erdogan, menurut Michael C. Desh tidak dapat dipertimbangkan sebagai kontrol sipil. Hal tersebut dikarenakan 'berkompromi' menyembunyikan kemenangan salah satu pihak, dimana pemimpin sipil harus melakukan tawar-menawar dengan militer.³⁰ Namun, hubungan tersebut justru yang dapat menciptakan kestabilan hubungan sipil militer Turki, dalam arti membawa konflik hubungan ke titik terendah hingga mampu mempertahankan satu periode kepemimpinannya.

Periode pertama PM Erdogan menggambarkan, bahwa hubungan sipil militer yang stabil hanya akan berjalan dengan cara yang sesuai dengan nilai yang berlaku dalam suatu bangsa. Upaya untuk membangun demokrasi dengan pemahaman demokratik yang menuntut militer untuk tunduk pada sipil, di Turki terbukti hanya akan berakhir pada konflik sipil-militer sebagaimana yang terjadi pada kudeta 1960, 1970, 1980, dan 1997. Namun, jika demokrasi dipahami sebagai sebuah proses untuk mencapai kestabilan politik suatu bangsa, dimana antara militer, sipil maupun masyarakat menyepakati pemisahan, penyatuan, atau bentuk hubungan sipil militer yang akan mereka terapkan, kemungkinan intervensi domestik militer pun akan berkurang.³¹ Hal inilah yang menjadi strategi AKP untuk menyeimbangkan kedudukan sipil dan militer yang kompromistis, sehingga masyarakat sipil tidak khawatir akan terkontaminasi kekuatan militer yang suatu saat bisa mengoyang pemerintahan.

2. Sosial-Keagamaan

Dalam urusan sosial-keagamaan AKP selalu mencoba memberikan yang terbaik bagi rakyat Turki. Jilbab merupakan salah satu isu sensitif di Turki, bagi elit Kemalis, jilbab adalah simbol perawanan agama tertentu

³⁰ Michael C. Desch, "Politisi VS Jenderal: Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang bergeser," Terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 7.

³¹ Rebecca L. Shifft, 7-24. Dikutip dalam Leman Basar Ari, "Civil Military Relation in Turkey," *Applied Research Project: Public Administration Program*. San Marcos: Texas State University, 2007. Lihat Tiara Sarah Puteri Sumantri, *Demokratisasi Turki: Hubungan Sipil-Militer Tahun 2003-2011* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 250.

(Islam) terhadap negara, Jilbab dianggap sebagai simbol Islamis yang dikhawatirkan akan membahayakan sekularisme Turki. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata aturan yang diyakini sebagian besar elit Kemalis termasuk militer tentang undang-undang yang ada sangatlah impresif, seperti perlakuan mereka terhadap banyak orang. Jilbab secara tegas ditentang dan dilarang terutama di tempat-tempat tertentu, seperti sekolah, universitas dan gedung-gedung pemerintah. Bahkan semua itu berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu.³²

Ada tiga isu sensitif yang terus diperjuangkan oleh kalangan Islamis, termasuk oleh partai AKP, yakni isu Jilbab, Imam Hatip School, Kursus Pengajaran Al-Qur'an. Mengenakan Jilbab merupakan tindakan terlarang di Turki, ia menjadi isu sangat sensitive setidaknya pasca tahun 1980. Para mahasiswi yang mengenakan Jilbab dikeluarkan dari universitas oleh Dewan Pendidikan Tinggi (YOK, sejenis Dikti di Indonesia).

Upaya AKP untuk memberikan kebebasan kepada para mahasiwi khususnya, untuk mengenakan jilbab dengan beragam cara. Erdogan sendiri memilih dua inisiatif dalam kasus ini. Pertama ia mengusulkan agar pembatasan dan pelarangan penggunaan jilbab diperbolehkan di sekolah negeri, sedangkan pada tingkatan universitas hal itu diperbolehkan. Akan tetapi usulan tersebut tidak mendapat respon positif dari kalangan Kemalis, tidak mendapatkan respon, Erdogan kemudian menawarkan opsi lain yakni agar pembatasan tersebut berlaku hanya di universitas negeri sedangkan pada universitas swasta larangan dihilangkan alias diperbolehkan. Namun upaya ini juga tidak berhasil.

Isu jilbab bisa juga diibaratkan bagaikan dua sisi mata pedang bagi AKP. Di satu sisi, para konstituen AKP yang mayoritas muslim taat (salah satu indikasinya dalam hal mengenakan jilbab) berharap banyak agar AKP mampu menyelesaikan persoalan ini. Disamping mayoritas para elit AKP yang duduk di parlemen maupun pemerintahan (Seperti Erdogan dan Gul) memiliki istri dan saudara-saudara perempuan yang juga mengenakan jilbab. Sedangkan disisi lain, AKP tidak serta merta mampu menyelesaikan persoalan ini secara gampang karena persoalan jilbab juga merupakan isu

³² Sebelumnya banyak kalangan mahasiswi muslimah di universitas yang menanggalkan Jilbab untuk mentaati undang-undang agar bisa melanjutkan pendidikan. Bahkan, seperti disebutkan Ahmad Syahidah mengutip seorang Prof. Dr. Zailan Moris, seorang nenek pun harus melepaskan jilbab jika ingin memasuki sebuah universitas. Satpam kampus memaksa sang nenek meskipun yang terakhir bersikeras untuk tetap memakainya. Sehingga potret seperti ini jelas-jelas menunjukkan sebuah warna fundamentalisme sekuler. Lihat Ahmad Syahidah, "Jilbab dan Politik Islam di Turki," dalam <http://www.republika.co.id>, akses tanggal 07 Mei 2008. Lihat Skripsi M. Sya'roni Rofi'i, "Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)," *Skripsi* Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm. 90.

sensitif yang selama ini sering membahayakan partai-partai Islam di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali membekukan partai Islam karena alasan jilbab ini, sebut saja Partai Refah (Refah Partisi) dan Partai Fazilet (Fazilet Partisi). Namun demikian tindakan elit Kemalis yang cenderung berfikir negatif secara perlahan dicoba oleh para pemimpin AKP untuk terus melakukan upaya-upaya lain untuk menyelesaikan persoalan jilbab. Hal yang sama juga dialami oleh AKP ketika berhadapan dengan isu Imam Hatip School dan Kursus Pengajaran Al-Qur'an, mereka lagi-lagi dihadapkan pada guncangan politik di wilayah domestik.

Perlahan AKP mencoba menggunakan pendekatan yang lebih logis dan moderat dalam mengadvokasi tiga di antara sekian banyak persoalan yang harus diselesaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban partai AKP atas kepercayaan yang diberikan oleh para konstituennya. Isu-isu yang seperti ini banyak diselesaikan di parlemen dengan penggunaan jalur legislasi.

3. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan di Turki modern pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan telah mencapai kemajuan yang cukup pesat, dikarenakan di era modern ini telah banyak sekolah-sekolah yang didirikan dalam bentuk yayasan dengan corak yang bernuansa Islami, dimana sangat berbeda dengan massa kepemimpinan Musthafa Kemal, yang meniadakan simbol-simbol Islam di ranah pendidikan.³³

Kebudayaan di Turki mempunyai beberapa kesamaan dengan kebudayaan Barat, hal ini disebabkan karena faktor-faktor sejarah dan geografis. Orang-orang Turki dari Anatolia telah menjadi penguasa dan pelindung ujung Barat dari dunia Muslim berabad-abad lamanya. Mereka memerintah wilayah yang luas dari Eropa Timur dalam jangka waktu yang lama. Campur bergaulnya orang-orang Turki dengan orang-orang Eropa telah menciptakan pola kebudayaan mereka, kekhususan-kekhususan tertentu yang membedakan mereka dari orang-orang Eropa dan orang-orang Asia.³⁴

Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena perkembangan pendidikan di suatu bangsa tertentu pasti akan mempunyai pengaruh pada tingkat kebudayaan disekelilingnya menjadi berubah. Hal inilah yang menjadikan AKP mengambil alih pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan

³³ Wawancara penyusun Skripsi dengan Duta Besar Republik Turki, di gedung Duta Besar Republik Turki di Jakarta. 15 Desember 2013.

³⁴ H.A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern* (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 155.

masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di Turki, artinya memperlunak sekularisme Attatutk menjadi utsmani baru (*New Ottoman*).

4. Ekonomi

Mengandeng Uni Eropa merupakan rencana Republik Turki untuk bisa bergabung menjadi salah satu komunitas yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik perkembangan signifikan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Menurut pemerintah, Investasi merupakan salah satu prioritas pembangunan dan didukung dengan agen promosi bidang investasi, hal itu dilakukan sejak tiga tahun lalu, sehingga Turki saat ini menjadi produsen kapal terbesar urutan kedelapan dunia. Jika Turki telah menjadi anggota tetap UE maka ia akan menduduki peringkat keenam dalam perkembangan di bidang ekonomi dan dalam kelompok UE termasuk berada pada peringkat ketujuh belas dunia.

Karakteristik AKP yang kini memimpin pemerintahan membuka kran selebar-lebarnya untuk investor yang ingin menanamkan modal atau membeli saham di bidang ekonomi, khususnya investor asing, telah ada beberapa daftar investor asing yang diberikan izin untuk bermain di arena ekonomi Turki.

Pada tahun 2006 Vodafone salah satu perusahaan komunikasi asal Inggris membeli sejumlah saham operator GSM Telsim sekitar \$4.7bn. pada tahun yang sama Citigroup membeli 20 persen saham pada Akbank untuk \$3.1bn dan Nationan Bank of Grecece, dan terdapat juga pembeli saham yang benuansa politis untuk membeli Finansbank. Citigroup juga membeli Opus Securities, sebuah cabang bank lokal.

Promosi intensif juga terus dilakukan pemerintah Turki, seperti yang juga dilakukan Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan, saat menghadiri konferensi pada bulan oktober di London, dalam konferensi tersebut Edogan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Turki pada bidang-bidang yang telah dirancang pemerintah, seperti membuka railway, jalan-jalan, proyek metro, perumahan rakyat dan bandar udara.

Dimana investor asing Turki bukanlah dalam kategori buruk dalam urusan perizinan dan kerjasama, cukup teratur dalam urusan pekerja. Cukup sehat dalam parameter dunia bisnis permulaan bagi pihak asing. Ranking yang relatif redah merefleksikan urutan ke 53 yang disematkan oleh World Economic Forum's indeks dalam persaingan global, walaupun peringkat itu merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada urutan ke 58. Menurut forum tersebut kenaikan ranking disebabkan karena kemampuan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sekaligus mampu membaca peluang ekonomi secara intensif. Namun demikian forum tetap

mengkritisi standar infrastruktur, kepedulian atas pendidikan dasar dan kesehatan.

Merespon hal tersebut pemerintahan AKP kemudian menciptakan tiga resep untuk pengembangan dengan basis tiga zona untuk investasi. Pemerintah membagi zona ekonomi negaranya menjadi 81 kawasan tujuh diantaranya dalam kategori "kawasan pembangunan" Istanbul, kecuali, Ankara, Izmir, Bursa, Adana dan Antalya; 20 kawasan dalam kategori pembangunan "normal"; dan 54 dalam kategori "prioritas".

Pada masing-masing provinsi terdapat parkir berteknologi (tecnoparks) dan kawasan bebas perdagangan, dimana disana tidak terdapat perusahaan. Pada tecnoparks, para investor dimanjakan dan dipuaskan dari segi pelayanan oleh para agen pemerintah yang telah memiliki kemampuan ilmu dan teknologi tingkat tinggi.

Menurut Korkmaz yang juga seorang pejabat pemerintah menyebutkan bahwa pemerintah Turki sedang dalam tahap mempersiapkan berbagai aturan baru, direncanakan akan selesai dalam waktu enam bulan, dalam rangka mendukung inovasi, penelitian dan pengembangan bagi kemajuan Turki.

Optimisme terus dipupuk oleh Erdogan untuk mengawal perkembangan negeri itu, menurutnya seperti dikutip Vincent Boland,³⁵ tidak ada alasan untuk Turki tidak maju melangkah menjadikan tingkat produk domestik (GDP) \$1,000bn dibidang ekonomi (pada tahun 2006 GDP \$410bn). Ia juga berusaha untuk menaikkan tingkat GDP tahunan perkapita menjadi \$10.000 pada tahun 2013, dari yang saat ini hanya \$6.000.³⁶

Kursan Tuzman, mentri perdagangan saat itu, juga memiliki ambisi yang sama untuk meningkatkan grafik GDP nasional sesuai dengan parameter perkembangan pembangunan modern, meskipun tingkat impor lebih tinggi yang ditujukan untuk memasok kebutuhan dalam negeri, namun disisi lain impor merupakan parameter perkembangan ke arah yang lebih baik, sebab hal itu juga disandingkan dengan tingkat ekspor terus-menerus yang juga meningkat merupakan upaya positif pemerintah yang memiliki kebijakan pro-bisnis sejak tahun-tahun yang lalu. "ketika ekspor kita melebihi \$100bn dalam setahun maka kita dapat melihat diri kita sebagai bagian dari frame negara-industri," kata

³⁵ Vincent Boland, "Policy Follow Trade Abroad," *Financial Times*, 21 November 2007. Lihat Skripsi M. Sya'roni Rofi'i, "Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)," *Skripsi* Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm. 86.

³⁶ *Ibid.*

Tuzman.³⁷

Turki, tentu saja melanjutkan upayanya untuk menjadi pasar yang potensial, namun demikian menteri memiliki *point* lain. Negara memiliki kekuatan di bidang industri yang terus bergerak dengan basis produksi di bidang industry seperti industri otomotif, tekstil, bidang kimia, permesianan, dan produksi makanan.

Sektor tersebut berpotensi mendatangkan investasi sekaligus mampu menyerap lapangan pekerjaan dalam jumlah yang tidak sedikit dan fleksibel, dan berdampak positif juga pada nilai tukar mata uang Turki (Lira) tentunya menjadi lebih mahal.

Sekitar 55 persen ekspor Turki ditujukan kepada negara-negara UE, dimana Turki telah mendapatkan prevelis (keistimewaan) sejak 1996. Namun Tuzman menyebutkan sejak tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Turki justru meningkat saat mempromosikan produk-produknya kepada negara-negara tetangga seperti di Asia dan Afrika. Sejak tahun 2003 juga, ekspor ke Bulgaria dan Rumania meningkat menjadi \$3bn dan \$5bn, sedangkan ekspor ke negara-negara tetangga meningkat dari 7 persen menjadi total 33 persen. Ekspor ke Rusia meningkat dari \$10bn menjadi 25bn.

Kebijakan "Pertentangan (*neighbourhood*)" menjadi pusat perhatian pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Erdogan telah membujuk investor kawasan Teluk, yang berminat untuk menuangkan investasinya di beberapa aset yang dimiliki Turki. "It is very important for the politics of Turkey and for our foreign policy," kata Tuzman menilai kebijakan ekspor. Ia melihat misi diplomatik bidang luar negeri memiliki dampak positif terhadap urusan bisnis atau komersial. "Foreign policy now follows foreign trade policy, (Hari ini kebijakan politik luar negeri mengikuti kebijakan perdagangan luar negeri).

Dalam upaya mendukung pertumbuhan Tuzman menyebut beberapa *point* yang akan menjadi resep pemulihan atau peningkatan kemajuan yang telah dicapai di antaranya adalah mereformasi bidang mikro-ekonomi, memperbaiki infrastruktur Turki, melanjutkan privatisasi, mengembangkan pelabuhan- terutama Mersin, di kawasan Mediterania dan memperbaiki infrastruktur bidang ekspor dan impor. Hal lain yang menjadi kendala bagi para eksekutif dan pelaku bisnis Turki adalah visa perjalanan yang tentunya menghabiskan waktu untuk mengurusnya ketika berada di kawasan UE, sedangkan para eksekutif UE ketika datang ke Turki diberi kemudahan untuk meraih visa. Oleh karena itu pemerintah Turki mencoba melobi Brussel untuk

³⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

mempermudah atau meneken kerjasama (MoU, *Memorandum of Understanding*) yang memberikan kemudahan kepada semua pihak. Hal itu bukan lagi menjadi persoalan ketika Turki telah resmi menjadi anggota penuh UE.

5. Hubungan Politik Internasional

Republik Turki mempunyai hubungan yang cukup baik diantara negara- negara sahabat di Liga Arab, diantaranya yaitu ikut melaksanakan perdamaian palestina, menjaga hubungan Turki dengan Suriah, ikut pula menentukan kebijakan luar negeri dengan Irak, kerjasama distribusi minyak dengan Arab Saudi dan menjalin hubungan kerjasama di berbagai negara-negara Teluk, sehingga negara Turki mempunyai elektabilitas politik dengan berbagai negara di kawasan Liga Arab, dimana mempunyai penyeimbang ekonomi nasional dengan menjalin hubungan kerjasama dalam bidang perminyakan dinegara-negara penghasil minyak yang berada di kawasan Teluk, daripada itu Turki mampu menghindari inflasi politik ekonomi global yang selama ini mengancam negara- negara Timur Tengah (*Middle East*) maupun Uni Eropa (*Union Eroupe*).

Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) mampu mengembalikan kedudukan dan hubungan internasional Turki yang strategis, yang dibangun setelah republik Turki berdiri di atas keselamatan eksistensi baru Turki yang terlahir dari kesultanan ustmani dan menghindari konfrontasi. Kemudian hubungan ini terus berkembang dalam masa perang dingin, yang menempatkan Turki sebagai negara yang berhadapan langsung dengan bahaya komunis Uni Soviet. Setelah ancaman bahaya ini hilang, maka Turki pun menjadi jembatan penghubung anantara Barat Kristen dan Timur Islam. Dimana dibentuk hubungan luar negeri Turki sebagaimana dibidangi oleh AKP dibawah pimpinan Recep Tayyep Erdogan, menempatkan Turki sebagai pusat aktifitas dikawasan tersebut. Ini berarti bahwa Turki memperluas daerah dan jangkauan wilayah hubungan luar negeri yang mencakup sejumlah negara di Barat. Terutama negara-negara yang masih ada ikatan geopolitik, kebudayaan dan sejarah.

Dalam menjelaskan fungsi dan tugas geopolitiknya yang semakin tumbuh pesat pada masa setelah perang dingin berakhir, Turki memainkan peran sentral dan strategi atlas yang khusus bertugas membendung komunisme Uni Soviet dengan mengandalkan letak geografinya yang menguasai pintu gerbang selatan bagi republik-republik Uni Soviet di Asia. Hal ini terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Adapun yang perkembangan sekarang ini, maka diperlukan pengertian baru tentang fungsi dan tugas geopolitik, dimana Turki mengajukan dirinya sebagai jembatan penghubung bagi kekuatan-kekuatan yang ingin menyebrang ke Barat, baik dari Asia Tengah, Kaukus, dan Timur Tengah.

Timur Tengah (*Middle East*) menjadi fokus perhatian Turki kembali semakin mendekatkan dirinya ke kawasan tersebut. Bahkan Turki kembali berupaya menggali arti penting wilayah Timur Tengah (*Middle East*) ini sebagai upaya memperkuat kedudukan internasionalnya.

Sebagaimana pengamat berpendapat, bahwa tokoh tokoh politik yang mendukung Barat yang menjalankan politik luar negeri Turki sejak akhir perang dunia kedua semakin menurun secara bertahap hingga kemudian kedudukannya ditempati oleh tokoh-tokoh terpilih yang lebih religius dan memiliki nasionalis kuat yang ditakuti Barat, serta bangga dengan masa lalu Turki dengan kesultanan Ustmaniyah. Hal inilah yang mendorong Turki untuk semakin mendekatkan dirinya ke wilayah Timur Tengah (*Middle East*). Sebab wilayah Teluk ini mendapat posisi utama dalam prioritas kebijakan politik luar negeri Turki.

Mengenai pendapat sebagaimana pengamat politik, maka potensi yang dimiliki Turki secara khususlah yang menjaga eksistensi Turki dalam pandangan strategi Barat. Berdasarkan pengamatan salah satu penasihat politik luar negeri Turki bagi perdana menteri Turki, Recep Tayyeb Erdogan, maka keberhasilan Turki terfokus pada kemampuannya menyeimbangkan perannya sebagai negara penghubung antara para produsen dengan konsumen.

Meskipun Turki mengambil kebijakan sebagaimana telah disebutkan, akan tetapi hal ini tidak menghalangi kenyataan lain. Intinya, Turki sangat berharap untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa dan pada saat yang sama berupaya memperkuat peran strategis di kawasan Timur Tengah (*Middle East*) yang mengalami berbagai kerisis beberapa tahun dengan teman koalisinya. Inilah kenyataan yang diperhatikan kebijakan politik Turki, terutama dalam penjajahan Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003, kemudian menjalin hubungan erat kembali selama lima tahun selama perang di Ossetia Selatan. Dalam kesempatan tersebut, nampak Ankara lebih dekat dengan Washington dibanding dengan Moskow.³⁶⁰

Tidak jauh berbeda dari iklim politik adalah penolakan Turki terhadap permintaan NATO untuk mengirimkan tentaranya yang bertugas di Afganistan di daerah-daerah selatan negara itu, yang jauh lebih berbahaya. Perlu diketahui, Turki memiliki pasukan dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara setelah Amerika Serikat, dengan jumlah pasukan setengah juta personel yang sedang bertugas dan sembilan ratus ribu lainnya sebagai cadangan.

Secara global dapat dikatakan, Turki mampu memainkan peran signifikan dalam waktu yang lama dalam menyelesaikan berbagai konflik yang semakin memanas sekarang ini. Survai yang dilakukan Marshal Fund

memperlihatkan bahwa dukungan rakyat Turki terhadap NATO semakin menurun mulai dari 35% pada tahun 2000 menjadi 44% pada tahun 2006. Dalam konteks yang sama, rakyat Turki mengeluhkan bahwasannya Amerika Serikat tidaklah memperhatikan keinginan dan harapan mereka untuk memperkuat sistem pemerintahan mereka. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Turki sedang mendekati Rusia untuk tujuan ini.³⁶¹

Menteri Luar Negeri Turki, Ahmad Davu Toglu, menegaskan bahwa politik Turki berpacu dengan kebijakan politik Amerika Serikat secara global. Akan tetapi kita lihat sekarang tidak mencerminkan hubungan erat antara Amerika Serikat dan Turki. Sebab, Turki menerima dan menyetujui laporan Guldstone (komisi khusus tentang kejahatan serangan Israel terhadap Ghaza), dan ini merupakan laporan yang ditolak secara total dengan pernyataan Turki, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat pendukung utama kebijakan Israel dalam berbagai kejahatan politiknya, sedangkan Turki menolak politik semacam ini.³⁸

Jika memang kenyataan demikian, bagaimana Ankara dapat dipertemukan dengan Washington berkaitan dengan peran dan kedudukan strategis di kawasan Timur Tengah (*Middle East*), terutama semakin kejamnya kebijakan politik Amerika di kawasan ini. Turki berpendapat bahwa berbagai konflik di kawasan ini haruslah diselesaikan di tingkat regional. Ini merupakan strategis yang diharapkan memiliki peran besar di masa depan. Karena itu, Turki berpendapat bahwa apabila berbagai konflik dan problematika ini tidak dapat diselesaikan, maka hal itu akan memicu berbagai campur tangan dunia internasional sebagaimana terjadi di Irak dan Afganistan. Akan tetapi, Turki juga mengoreksi ulang pandangan politiknya di kawasan tersebut setelah menghapuskan keinginannya untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Pastinya, pemerintahan Turki sekarang memiliki garis Ideologi yang ingin memperjuangkannya dengan cara mengembangkan hubungan internasionalnya di kawasan Timur Tengah (*Middle East*) dalam berbagai bidang sesuai dengan pandangan politik Oglu yang sangat berharap terbentuk federasi kawasan Timur Tengah (*Middle East*) dengan negara Arab.

Dalam barisan pemerintahan Turki, dibutuhkan pengamatan ulang dalam berinteraksi dengan berbagai persoalan dan kepentingan Turki, baik dalam negeri, regional, maupun internasional. Sebagaimana disana juga terdapat kekosongan di tingkat regional kawasan tersebut,

³⁸ Syarif Taghayan, *Ayy-Syaikh Ar-Ra 'is Rajab Thayyib Erdogan - Mu 'addin Istabil Wa Mubatin Ash-Shanam Al-Ataturk*, alih bahasa Masturi Ilham dan Malik Supar (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), hlm. 268-269.

dimana Turki melihat bahwa masalah ini berkaitan erat dengan ide pemikiran yang dilontarkan Oglu mengenai strategi intensif. Apabila kekosongan ini terus berlanjut seperti ini, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif lebih besar di kawasan tersebut, dimana tidak ada satu pihak pun yang menaggung dampak-dampak tersebut kemudian hari.

Di sana terdapat *point* penting mengenai hubungan militer dengan pemerintah. Pada masa sekarang, pemerintah dihadapkan pada sebuah ujian berat dalam hubungannya dengan Amerika Serikat di masa depan jika pemerintah gagal mewujudkan janji-janjinya dalam berbagai bidang yang ditanganinya, diantara masalah Armenia dan Kurdistan.

Turki yang baru bergerak dalam lingkup yang kecil di kawasan Timur Tengah (*Middle East*), dan bahkan di dunia Islam secara umum. Di samping Iran, dimana pemerintahan Turki berusaha membangun jembatan bersamanya, pemerintahan Turki juga memusatkan kebijakan politiknya di kawasan Timur Tengah (*Middle East*) atau dunia Arab, terutama Syria dan Irak. Hal ini sebagaimana yang nampak dalam pesan politik Turki yang baru mengenai sebuah imajinasi pengembangan hubungan perdagangan dan perekonomian Syria, Yordania, dan Lebanon untuk bertukar komoditi perniagaan sebagai pintu gerbang untuk membangun pasar kecil bersama yang kemudian meluas secara bertahap dan mencakup negara-negara lainnya, terutama Irak. Disamping itu, Turki juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan Mesir dan juga kawasan Teluk, khususnya Arab Saudi yang dipandang sebagai kawasan terpenting. Ankara menegaskan kesungguhannya untuk mendapat kepercayaan dari pemerintah Riyadh dan juga Cairo, serta meyakinkan keduanya bahwa kembalinya Turki ke kawasan Timur Tengah (*Middle East*) bukan demi kepentingan sepihak dan mengabaikan pihak lain.

Beginilah prioritas utama kebijakan politik Turki dengan dunia Arab, sekarang dengan Syria, Yordania, dan Lebanon dalam kebijakan jangka pendek dan menengahnya, kemudian dengan Irak yang diharapkan Ankara semakin stabil kondisinya sehingga siap untuk mempererat hubungan dengannya. Fokus perhatian terhadap Irak ini bukan karena pengaruh Iran di dalamnya, melainkan arti penting kawasan ini untuk menyempurnakan jaringan yang berhasil dibangun bersama Syria, Yordania, dan Lebanon.

Ambisi-ambisi Turki yang sangat diharapkan bisa saja tidak tercapai dengan kondisi dunia internasional yang terus berubah. Bisa saja jadi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melihat pandangan strategisnya di kawasan regional dalam tataran realita. Ketika itulah Turki akan melihat sejauh mana berbagai pihak yang berbeda mampu

berinteraksi dengan janji-janji positif yang digelorkan AKP (*Adalet Ve Kalkinma Partisi*) yang sejauh mana hal itu berimplikasi pada kondisi dalam negeri Turki.

D. Analisis Politik Profetik dan Sistem Politik terhadap Strategi AKP dalam Transformasi Politik di Turki

1. Analisis Politik Profetik dan Sistem Politik

Semenjak *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) masuk pada konstelasi sistem perpolitikan Turki, AKP mendapat kemenangan politik dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang diamanahkan dari pemilihan umum tahun 2002, 2007 dan 2011. AKP juga mendapatkan kemenangan yang sangat signifikan, dalam perjalanan AKP di pemerintahan banyak membawa sebuah perubahan peradaban ketatanegaraan Turki. Dimana dalam hemat penyusun di Turki mengalami tiga tahapan peradaban ketatanegaraan yaitu ketatanegaraan usmani (*ottoman state*), ketatanegaraan sekularisme *attaturk* (*the pure sekularisme attaturk*), dan ketatanegaraan usmani baru (*new ottoman state*).

Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) tampil dengan menggabungkan dua konsep yang menggiring kemunculan "demokrasi" dan "konservatisme" dalam politik Turki. Konservatisme seringkali digunakan dalam mendefinisikan doktrin politik seseorang pemimpin politik, gerakan dan partai politik yang muncul sebagai sebuah kode politik yang mempresentasikan ideologi sayap-Kanan dalam spektrum ideologi politik Turki.³⁹ Gerakan sayap-Kanan tampil sebagai pemilik ideologi konservatif dan sebagai tuan rumah dari sejumlah sifat, preferensi dan kepentingan masyarakat Turki. Di Turki, konservatisme menitikberatkan pada ketaatan religius, adat sosial, tradisi, di atas inferensi rasional dan argumantasi logis dalam membangun institusi dan praktek kehidupan sosial-politik.⁴⁰

Identitas *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) merupakan bentuk Islamisme baru, dimana AKP berupaya menampakkan simbol-simbol Islam secara vulgar, dalam arti tidak menunjukkan simbol Islam di area publik, akan tetapi nilai moral keislaman yang di berikan dalam berbagai

³⁹ Ergun Ozbudun, *Islam and Modern Politics in Turkey: The Case of National Salvation Party*, dalam Barbara F. Stowasser (Ed.), *The Islamic Impulse*, (Washington D.C: The Centre for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1987), hlm. 143. Dikutip dalam Sencer Ayata, "Patronage, Party, and State: The Politization of Islam in Turkey", *Middle East Journal*, Vol. 50. No.1, (Winter 1996), hlm. 234.

⁴⁰ Kemal Harpart cf. Sinan Yirdimaz, "Conservatism, and Peyami Safa", *Journal of Historical Studies*, Vol. 1. 2003. Hlm. 10. Dikutip dalam dalam Sencer Ayata, "Patronage, Party, and State: The Politization of Islam in Turkey", *Middle East Journal*, Vol. 50. No.1, (Winter 1996), hlm. 234-235.

aksi politik ataupun komunikasi politik yang di lontarkan oleh AKP, sehingga AKP lebih dikenal oleh publik sebagai partai yang berlandaskan ideologi demokratik-konservatif.

Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) didalam penelitian ini mempunyai lima strategi untuk meyakinkan kepada masyarakat di Turki bahwa AKP mampu membawa pemerintahan Turki pada suatu kemajuan peradaban populisme, diantaranya adalah (1) strategi hubungan sipil militer, (2) sosial keagamaan, (3) pendidikan dan kebudayaan, (4) Ekonomi, (5) Hubungan Internasional. Dimana dari strategi ini menjadikan banyak perubahan di pemerintahan yang berawal dari partai AKP sebagai input politik didalam proses sistem politik yang menghasilkan output untuk perubahan keberadaban ketatanegaraan di Turki.

Secara keseluruhan AKP tidak bertentangan dengan semangat politik profetik yang mencakup nilai humanis, liberasi, dan transendensi. Pertama, humanis AKP terbukti dalam menyelesaikan konflik-konflik sipil-militer yang terus berlangsung sebelum pemerintahan dikendalikan oleh AKP, hubungan sipil- militer pasca AKP membawa perubahan yang dinamis, dimana menjadikan hubungan yang kompromistis antara sipil dan militer.

Kedua, liberasi AKP terlihat dalam strategi sosial keagamaan menjadikan struktur sosial yang harmonis antar umat beragama, dalam hal pendidikan dan kebudayaan di Turki mempunyai kebijakan yang memeberikan kebebasan untuk mendirikan yayasan yang bernuansa pendidikan ataupun kebudayaan yang ada. Sedangkan dalam hal dalam hal ekonomi kebijakan politik yang membebaskan masyarakat Turki dari kemiskinan dengan upaya mewujudkan program peningkatkan ekonomi mikro dan makro untuk pemerataan stabilitas ekonomi bagi masyarakat dan negara. Dalam strategi hubungan politik internasional mampu bekerjasama dengan pihak Timur dan Barat, sehingga mengurangi angka kesenjangan sosial di Turki, dimana berguna untuk mensejahterahkan sosial- ekonomi Turki yang mandiri dan berdaulat.

Ketiga, transendensi AKP terlihat dalam penentuan kebijakan-kebijakan di pemerintahan yang selalu berpengangan prinsip Islam, dengan mentransformasi nilai-nilai keislaman untuk menggerakkan perubahan sosial politik berbasis moral kenabian, yang berarti memaknai suatu kebijakan pemerintah dalam aspek kemaslahatan umat mayoritas dan melindungi yang minoritas dengan mempunyai keimanan kepada Allah SWT dalam setiap memutus sebuah kebijakan.

Adapun strategi Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) menurut sistem politik telah sesuai dengan siklus sistem politik, baik sistem politik

menurut David Easton, Gabriel Abraham Almond, ataupun sistem politik yang telah dimodifikasi oleh penyusun, khususnya sistem politik yang ada di Turki.

Sistem politik menurut David Easton merupakan alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Kata otoritatif membuat sistem politik Easton langsung berhubungan dengan negara.⁴¹ Sedangkan ada empat atribut pokok yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik, diantaranya; *pertama*, unit-unit batasan sistem politik, *kedua*, input-output, *ketiga*, diferensiasi dalam sistem, dan *keempat*, integrasi dalam sistem.⁴²

Hal ini dapat dijelaskan bahwa unit-unit batasan sistem politik di Turki mempunyai arti lembaga yang otoritatif dalam menjalankan sistem politik yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan perhimpunan masyarakat militer. AKP termasuk partai politik yang mampu memainkan peranan unit batasan sistem politik di Turki yang sangat dominan.

Input-output dalam sistem politik di Turki banyak faktor, baik itu tuntutan dan dukungan dalam input ataupun tindakan dan keputusan dalam output, tuntutan yang diemban Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) harus mampu memahami isi konstitusi sesuai dengan konteksnya yaitu masyarakat sekuler dan menjembatani masyarakat sipil-militer yang tidak seimbang. Sedangkan dukungan yang diemban Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) dicapainya dari kalangan Muslim terutama aliran tasawuf Islam dalam mendukung AKP mengendalikan sistem politik di Turki, sedangkan dalam Output yang mencakup keputusan dalam AKP bahwa AKP menguasai parlemen untuk menjalankan fungsinya dan tindakan AKP mempunyai arti bahwa implementasi AKP sepenuhnya berasal dari input.

Diferensiasi dalam sistem politik di Turki, dalam konteks partai politik AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) menempati posisi pada sayap kanan yang memiliki ideologi politik demokratik-konservatif, sedangkan CHP (Cumhuriyetci Halk Partisi) yang merupakan rival politik AKP menempati posisi sayap kiri yang memiliki ideologi politik sekuler dan berafiliasi dengan militer, sedangkan MHP (Milliyetci Harekat Partisi) menempati posisi tengah-kiri yang mempunyai ideologi politik nasional-sosialis yang berafiliasi dengan kaum buruh.

Integrasi dalam sistem politik di Turki, bisa dilihat dengan

⁴¹ Michael Saward, "The Wider Canvas: Repretation and Democracy in State and Society," dalam Sonia Alonso, John Keane, and Wolfgang Merkel, eds., *The Future of Representative Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2011), hlm. 80.

⁴² Ronald H. Chilcote, *Theories of Comperative Politics: The Search for a paradigm*, (Colorado: Westview Press, 1981), hlm. 147.

keberhasilan dalam ketatanegaraan di Turki yang menjadikan corak usmani baru, dibawah dari partai AKP, peranan parlemen, perdana menteri dan presiden dalam mengawal ketatanegaraan yang sesuai dengan aturan main dalam menjalankan pemerintahan, sehingga menghasilkan sebuah tatanan ketatanegaraan yang dinamis dan saling mempengaruhi dalam mencapai perubahan di Turki.

Dalam sistem politik Gabriel Abraham Almond, bahwa Almond membagi tiga level, diantaranya:³⁶⁷ *Level pertama* terdiri atas enam *fungsi konversi* yaitu: (1) *artikulasi kepentingan* (penyampaian tuntutan dan dukungan); (2) *agregasi kepentingan* (pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan undang-undang); (3) *komunikasi politik*; (4) *pembuatan peraturan* (pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat); (5) *pelaksanaan peraturan* (penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara), dan; (6) *pengawasan peraturan* (pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara). Dalam hal ini AKP telah melaksanakan fungsi-fungsinya pada level pertama ini, dikarenakan AKP berhasil mengelola parlemen dengan membuat aturan-aturan yang pro terhadap konstituennya.

Level kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada *fungsi-fungsi kemampuan*. Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif, simbolis, dan responsif. Kemampuan *ekstraktif* adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik (dalam negeri) maupun internasional. Dalam hal ini AKP mampu mengelola sumber daya manusia yang dominan dan mampu membawa legitimasi Turki pada kancah Internasional dalam berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Level ketiga ditempati oleh fungsi *maintenance* (pemeliharaan) dan adaptasi. Kedua fungsi ini ditempati oleh sosialisasi dan rekrutmen politik. Teori sistem politik Gabriel A. Almond ini kiranya lebih memperjelas maksud dari David Easton dalam menjelaskan kinerja suatu sistem politik. Melalui Gabriel A. Almond, pendekatan struktural fungsional mulai mendapat tempat di dalam analisis kehidupan politik suatu negara. Dalam hal ini AKP berhasil menarik simpatisan politik yang berasal dari berbagai latar belakang, terutama dari kalangan orang-orang sekularis ikut serta bergabung dan memeperkuat AKP dan menjadikan kalangan tasawuf Turki sebagai basis AKP berteduh.

Sedangkan sistem politik di Turki menurut modifikasi penyusun

bahwa ketatanegaraan di Turki tidak terlepas dari cita-cita negara-bangsa (*nation state*) yang telah dibangun oleh bapak bangsa (*founding fathers*) Mustofa kemal Attaturk, dimana peran militer (*military society*) lebih ditekankan daripada masyarakat sipil (*civil society*) demi kepentingan nasionalisme Turki atas intrvensi politik negara-bangsa Eropa. Maka, partai AKP mempunyai tugas untuk menampung segala hal yang dikehendaki oleh masyarakat sipil dan militer yang ada di Turki (*input*).

Pengaruh partai AKP cukup besar dalam menentukan arah masa depan negara-bangsa (*nation state*) Turki, karena partai ini sebagai partai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut, dimana bisa mendapatkan lebih banyak menepatkan kursi kekuasaan di parlemen daripada partai yang lain. Sehingga partai AKP mampu menyampaikan lebih banyak aspirasi dari para konstituennya dan masyarakat secara umum (*the gate keepers*).

Dari situlah aspirasi semua warga Turki diproses dalam penggodokan sistem politik (*political system*) dengan beradu argumen politik dan hukum dikalangan parlemen yang mengetahui perdana menteri (PM) dan Presiden, tentu suara yang mayoritas akan menjadi sebuah kebijakan Turki (*output*). Sehingga dari kebijakan tersebut merealisasikan cita-cita negara bangsa (*nation state*) Turki untuk dilaksanakan oleh seluruh warga Turki (*feedback*).

Peranan gerakan Islam cukup masif di dalam mendorong perubahan ketataegaraan Turki modern ini, dimana gerakan sosial keagamaan terutama gerakan Islam mempunyai kontribusi yang besar terhadap kemajuan ketatanegaraan Turki, yang mana penyampaian aspirasinya melalui partai politik Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) sebagai intrasosial sebagai input dalam sistem politik di Turki, sehingga gerakan sosial politik mendapat pengakuan (*legitimate*) dari pemerintahan yang absah. Disinilah semangat Islam mulai muncul kembali untuk menempatkan tujuan syari'ah Islam yang berprinsip pada nilai profetik secara terang-terangan di masa yang tepat.

Alhasil, strategi sosial politik yang dilakukan oleh AKP dalam mengemban pertanggungjawaban untuk mengendalikan kekuasaannya pada sebuah negara bangsa Turki, baik itu di parlemen dan eksekutif Turki mampu memasukkan nilai-nilai substansi profetik, yaitu menjunjung tinggi nilai humanis, liberasi, dan transendensi. Dimana dalam perjalanannya tidak bertentangan dengan sistem politik yang ada di Turki.

2. Signifikansi AKP dalam Konteks Perpolitikan di Indonesia

Ketatanegaraan Indonesia dan Turki mempunyai beberapa persamaan yang signifikan, pengalaman Turki tentu menawarkan suatu inspirasi yang dapat dijadikan rujukan utama dalam pembangunan bangsa. Sama halnya dengan deklarasi kemerdekaan Turki tahun 1923, kelompok

nasionalis Indonesia juga melakukan hal yang serupa pada proklamasi kemerdekaannya pada tahun 1945. Turki mempunyai ideologi negara bangsa yang dikenal sebagai ideologi Kemalis, dimana Ideologi ini berawal dari gagasan Mustafa Kemal Attaturk untuk membangun nasionalisme Turki. sedangkan Indonesia mempunyai ideologi negara bangsa yang dikenal sebagai ideologi Pancasila, dimana Pancasila sebagai bentuk pemersatu pandangan dari berbagai latar belakang pemikiran *Founding Fathers* negara bangsa Indonesia menjadi sebuah landasan dalam bertatanegara.

Indonesia dan Turki mempunyai kesamaan bahwa kedua negara dalam bimbingan filososi negara korporatis yang memberikan keistimewaan otoritas kepada negara atas hak individu dan kewenangan militer dalam urusan sipil. Keduanya pun melihat ini sebagai cara efektif jika diperluas kedalam persoalan agama.

Dampak dari kondisi tersebut ialah peran yang saling mempengaruhi antara wilayah sipil dengan militer, keadaan yang serupa juga terjadi di Indonesia saat memberikan hak istimewa secara politik, budaya, dan sosial kepada militer yang dinilainya sebagai pahlawan nasionalis dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kedua negara memandang pentingnya peran militer yang kuat untuk kelangsungan hidup dan pembangunan awal republik. Gagasan ideologis dibalik statisme Republik Turki juga serupa dengan kondisi Republik Indonesia pada dua dekade setelah kemerdekaannya. Walaupun di era reformasi Indonesia menyatakan sikap dengan jelas bahwa militer yang masih aktif tidak boleh ikut berpolitik dikancah nasional. Namun dengan demikian, *mind seat* masyarakat Indonesia masih mengagumi kepemimpinan yang berlatar belakang dari militer.

Dalam hal ini Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membangun demokratisasi dan sistem politik di Turki, dimana AKP mampu menjembatani kekuatan sipil dan militer menjadi hubungan yang kompromistis, sehingga menjadikan instrumen pembawa aspirasi (*input*) dalam mengambil kebijakan (*output*) yang menjadikan perubahan ketatanegaraan yang baru.

Perubahan ketatanegaraan di Turki sebabkan adanya gerakan perubahan partai politik yang dikendalikan Adalate ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam konteks perpolitikan di Turki, AKP mempunyai ideologi demokratik-konservatif dalam berpolitik, dimana mempertahankan segala hal yang pemikiran-pemikiran tokoh Turki lama yang masih relevan dan mengambil konsensus bersama dalam mengambil segala hal yang baru untuk kepentingan kemajuan berbangsa dan bernegara.

AKP mempunyai semangat Profetik dalam menjalankan gerakan

partai, baik untuk menempuh simpatisan rakyat di Turki, ataupun dalam membuat program-program yang pro rakyat. Menurut hemat penyusun AKP tampil dalam perpolitikan di Turki menjalankan substansi nilai-nilai profetik tanpa melakukan obral janji Islam demi menempuh simpatisan rakyat untuk memilihnya.

Besar harapan bahwa perpolitikan AKP bisa diterapkan bagi partai politik yang ada di Indonesia, yang mengacu pada semangat Profetik, yang selalu mengedepankan nilai-nilai penting yaitu Humanis, Liberasi, dan Transendensi. Tanpa melakukan justifikasi agama Islam untuk kepentingan politik.

AKP mampu membuat kebijakan mempunyai substansi nilai Islamis, dengan mengambil alih kekuatan di parlemen dan pemerintahan (eksekutif) untuk kepentingan mayoritas warga negara di Turki yang beragama Islam dan melakukan perlindungan kepada kelompok minoritas, hal inilah yang di sebut oleh penyusun sebagai partai yang ideal dalam berpolitik.

E. Penutup

Beberapa hal yang dapat disimpulkan di sini di antaranya adalah: *pertama*, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki membawa pengaruh besar dalam konteks ketatanegaraan Turki, dimana menjadikan Turki ke sebuah perubahan ketatanegaraan usmani baru (*new ottoman state*) yaitu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pondasi dalam menjalankan pemerintahan. *Kedua*, Strategi Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) didalam penelitian ini mempunyai lima strategi sosial politik untuk meyakinkan kepada masyarakat di Turki bahwa AKP mampu membawa pemerintahan Turki pada suatu kemajuan peradaban populisme, diantaranya adalah (1) strategi hubungan sipil militer yang kompromistis, (2) sosial keagamaan yang egaliter, (3) pendidikan dan kebudayaan yang mengakui pendirian di luar pemerintah, (4) Menjadikan ekonomi Turki yang stabil dalam aspek mikro dan makro, (5) menjalin Hubungan internasional antara Liga Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. *ketiga*, Politik profetik merupakan seni atau upaya perjuangan politik untuk mencapai sesuatu kehidupan yang lebih baik dengan berpedoman pada nilai-nilai kenabian dan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Dalam politik profetik mempunyai tiga pilar utama untuk memahami makna profetik yaitu nilai humanis, liberasi, dan transendensi. Sebagaimana hal ini dimodifikasi dari pemikiran kutowijoyo mengenai ilmu sosial profetik yang mencoba menafsirkan dari Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 110 dan menggabungkan dalam konteks sosial politik yang dinamis. Hal ini terdapat pada strategi AKP dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu (1) menjadikan hubungan

sipil-militer yang kompromistis, (2) memberikan kebebasan dalam sosial-keagamaan sesuai dengan kebenaran yang diyakininya, (3) melakukan pengembangan di dalam pendidikan yang didirikan oleh yayasan dan melestarikan kebudayaan, (4) membuat rancangan kinerja ekonomi jangka pendek dan panjang untuk menguatkan perkonomian mikro- makro di Turki, dan (5) menjalin hubungan politik internasional yang baik antara Turki dengan negara-negara Liga Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Dimana dari kelima strategi tersebut menurut hemat penyusun sejalan dari semangat politik profetik, yang telah mencakup nilai humanis (manusiakan manusia), liberasi (membebaskan manusia dari keterpurukan), dan transendensi (berlandaskan norma agama). Sedangkan sistem politik merupakan kesatuan (kolektifitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan negara. Dalam memahami sistem politik harus memahami variabel kunci yaitu struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, output, respon dan umpan balik. *Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)* dinilai berhasil dalam menjalankan sistem politik di Turki, dikarenakan AKP mampu menjadi pelopor perubahan di Turki melewati kekuasaan yang otoritas dalam mengambil kebijakan (output) yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam tubuh AKP dan Aspirasi konstituennya, sehingga menjadikan Turki menjadi negara bangsa yang stabil dalam menjalankan keseluruhan sistem politik tanpa ada kesenjangan. sehingga strategi sosial politik AKP dalam pemerintahan di Turki telah sesuai dengan prinsip politik profetik dan tidak bertentangan dengan sistem politik di Turki. *Keempat*, Turki dan Indonesia mempunyai banyak kesamaan dalam menjalankan ketatanegaraan dan sistem politiknya, baik dalam pembentukan ideologi negara ataupun bentuk kenegaraannya. oleh karena itu partai politik Islam di Indonesia diharap lebih mengedepankan substansi nilai-nilai keislaman yang berorientasi pada semangat politik profetik dalam setiap mengambil kebijakan (*policy*), seperti halnya *Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)* yang selalu konsisten dengan ideologi demokratik-konservatif dengan semangat politik profetik untuk membawa perubahan Turki yang sangat signifikan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Enkiklopedi Oxford, John L. Esposito (ed), jilid 5
Departemen Agama RI. *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Semarang: Assyifa, 1998.
- Ahmad, Feroz. *The Making of Modern Turkey*. New York: Taylor & Francis e- Library, 2003.
- Ajansi, Turk Haberler. T.C. Babankalik Basin-Yayin ve Enformasyon Genel Mudurlugu, Ankara: Turkish News Agency, 2011.*
- Ali, H. A. Mukti. *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djamban, 1994.
- Altunisik, Meliha Benli and Ozlem Tur. *Turkey: Challenges of Continuity and Change*, New York: Roulledge Cuezon, 2005.
- Aras, Bulent and Omer Caha. "Fethullah Gulen and His Libral Turkish Islam Movement" *Revolutionaries and Reformers: Contemporary Muslims Movement in The Middle East*, Ed. Barry Rubin, New York: State University of New York Press, 2003.
- Barkey, Henry J. *Turkey and the Great Powers, Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century*, Eds. Celia Kerslake, kerem Oktem, Philip Robins, London: Palgrave Macmillan, 2010.
- Cetin, Muhammed. *The Gulen Movement: Civic Service Withot Borders*, New York: Blue Dome Press, 2009.
- Chilcote, Ronald H. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, alih bahasa Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Citre, Umit. "The Justice and the Development Party: Recreating the past after reforming it?". *Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of Justice and Development Party*, Ed. Umit Citre, New York: Roledge, 2008.
- Desch, Michael. C. *Politisi VS Jenderal: Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang bergeser*. Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fidel, Kenneth. "Military Organization and Conspiracy in Turkey". *Millitarism in Developing Countries*. Ed. Kenneth Fidel, New Jersey: Transaction Inc, 1975.
- Garaud, Roger. *Janji-Janji Islam, alih bahasa H.M Rasjidi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Gerges, Fawas A. *Amerika dan Islam Politik, Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan*, terj. Hamid Basyaib, Jakarta: Alfabet, 2002.
- Gokalp, Ziya. *The Principles of Turkism, alih bahasa Robert Devereux, Leiden:*

- E.J. Brill, 1968.
- Jhonson, Doyle Paull. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Koenjaraningrat. *Metode Penelitian Bidang Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Trukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001.
- Kuru, Ahmet T. "Changing Perspectives on Islamism Secularism in Turkey: The Gulen Movement and the AK Party", *International Conference Proceedings, Muslim Word in Transition: Contributions of the Gulen Movement*, London: Leeds Metropolitan University Press, 2007.
- Landau, Jacob M. *Attaturk and the Modernization of Turkey*, Leiden: E.J. Brill, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet ke-31*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial, cet ke-11*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Poerwokoesoemo, Mr. Soedarisman dan Redaksi Masyarakat. *Konstitusi Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pelopor, 1954.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, cet ke-2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarantakos, Satrios. 1993. *Sosial Research*, Melborn: Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993.
- Silverstein, Brian. "Sufism and Modernity in Turkey: From the Authenticity of Experience to the Practice of Discipline", *Sufism and the Modern in Islam*, Eds. Martin van Bruinessen and Julia Day Howell, New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 2007.
- Sumantri, Tiara Sarah Putri. *Demokratisasi Turki: Hubungan Sipil-Militer Tahun 2003-2011*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Taghiyan, Syarif. *Ayy-Syaikh Ar-Ra'is Rajab Thayyib Erdogan-Mu'addin Istanbul Wa Muthathim Ash-Shanam Al-Ataturki*, Alih bahasa Masturi Ilham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Kantsar, 2011.
- Toprak, Binnaz. *Islam and Political Development in Turkey*, alih bahasa Kasid Diningrat.R, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Toprak, Binnaz. *Islam and Political Development in Turkey*, Leiden: E.J. Brill, 1981.
- Yukleyen, Ahmet. "Sufisme in Islamic Group in Contemporary Turkey", *The Cambridge History of Modern Turkey Volume 4: Turkey in the Modern*

- Wordl, Ed. Resat Kesaba, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Zucher, Erik. *Sejarah Modern Turki*, alih bahasa Karsidiningrat, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Babas Haddy Putra, *Gerakan Turki Usmani Muda dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan di Turki Pada Tahun 1865-1883. Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.*
- Dede Kusmanto, *Respon Ulama' Terhadap Pembaharuan di Turki Ustmani (1839-1909)*. Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- M. Sya'roni Rofii. *Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)*. Skripsi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Maya Tamara Dewi, *Islam dan Politik di Turki (Telaah Negara Pasca Rezim Kemalıs)*. Skripsi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Siti Maesaroh, *Peranan Midbat Pasca Dalam Pembentukan Konstitusi 1876*. Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Siti Rochimah, *Tanzimat di Turki Tahun 1839-1871*. Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ari, Leman Basar. *Civil Military in Turkey. Applied Research Project: Public Administration Program. San Marcos: Texas State University, 2007.*
- Ayata, Sencer. "Patronage, Party, and State: The Polization of Islam in Turkey." *Middle East Journal*. Vol. 50. No.1, (Winter 1996).
- Aybet, Gulnur. and Filiz Baskan. "Constitutional Overhaul?", *The Wordl Today .Org*, July 2011.
- Aydinli, Ersel. "A Paradigmatic Shift for the Turkish Generals and an End to the Coup Era in Turkey", *The Middle East Journal*, Volume 63, Number 4, 2009.
- Barkey, Hendry J. "*Turkish Foreign Policy and Middle East.*" *CERI Strategy Papers, 1-13. 2011.*
- Bengio, Ofra. "The Limping Giant: Turkey and the Kurdish Question", *TEL AVIV NOTES*, Volume 5, Special Edition No. 8, 27 June 2011.
- Binci, Mucahit. "The Fethullah Gulen Movement and It's Politics of Representation in Turkey", *The Muslim Wordl*, Volume 96, January 2006.
- Cizre, Umit. "Demithologizing the National Security Concep: The Case of Turkey". *Middle East Journal*. Vol. 57. No. 2, Spring 2003.
- E. Meeker, Michael. "Intektual Muslim Baru di Republik Turki" *Islamika*, No. 5. Juli-September 1994.

- Giannotta, Valeria. "Is Turkey turning its face from the West?, SGIR 7th Pan-European Conference " *Politics in Hard Times*, Stockholm, Sweden, 9-11 September 2010.
- Gole, Nilufer. "Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elite and Counter-Elites." *Middle East Journal*, Vol. 51. No. 1. Winter 1997.
- Heper, Metin. "Islam and Democracy in Turkey: Toward a Rekonsiliation?". *The Middle East Journal*. Vol. 51. No. 1, Winter 1997.
- Heper, Metin. and Joshua R. Itzkowitz-Shiffrinson. "Civil-Military Relations in Israel and Turkey". *Journal of Political and Military Sociology; Social Science Module*. Winter 2005;33,2.
- Kalaycioglu, Ersin. "Politics of Conservatism in Turkey". *Turkish Studies*. Vol. 8. No. 2, June 2007.
- Kamrava, Mehran. "Military Professionalization and Civil-Military Relations in the Middle East". *Political Science Quarterly*. Vol.115. No. 1, Spring 2000.
- Kapsis, James E. "The Failure of U.S-Turkish Pre-War Negotiations: an Overconfident United States, Political Mismanagement, and the Conflicted Military". *Middle East Review of International Affairs (MERIA)*. Vol. 10, No. 3.
- Keskin, Turgul. "A Comparative Analysis of Islamist Movements in the Neoliberalization Process: Jama'at-e Islami in Pakistan and the Fethullah Gulen Movement in Turkey-Reactions to Capitalism, Modernity and Secularism", *Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University*, Blacksburg, Virginia, 9 September 2009.
- Kuru, Zeynep Akbuluta and Ahmet T. Kuru, "A Political International of Islam: Said Nursi's Faith-Based Activism in Comparison with Political Islamism and Sufism", *Routledge: Islam and Christian-Muslim Relation*, Vol. 19, No.1, 99-111, January 2008.
- Majalah Azzikra, No. 20, Tahun 2 (Juli 2006)
- Migdalovitz, Carol. "Turkey: Politics of Identity and Power", *Congressional Research Service: Report for Congress*, 21 September 2010.
- Onis, Ziya and Suhnaz Yilmaz. "The Turkey-UE-US Triangle Perspective: Transformation or Continuity?" *Middle East Journal*. Vol. 59. No. 2, Changing Geopolitics. Spring 2005.
- Ozbudun, Ergun. "Civilian Control of the Military: Why and What?", *Strasbourg: European Commission for Democracy Through Law*, (Venice Commission), 26 September 2007.
- Pacis, Defencor. "Tarikat and Camaat in Modern Day Turkey", *The Defense Analyses Institute*, 6 September 2000.

- Patton, Mercie J. "Turkey's Tug's of War". *Middle East Report*. No. 239. *Dispatches from the war Zones: Iraq and Afganistan, Summer 2006*.
- Saritoprak, Zeki and Sidney Griffith, "Fethullah Gulen and the people of the Book: A Voice from Turkey for Interfaith Dialogue", *The Muslim World*, Vol. 95, July 2005.
- Villellas, Ana. "Turkey and the Kurdish Question: Reflecting on Peace Building", *QUADERNS DE CONSTRUCCIO DE PAU* No. 22, June 2011.
- Yavus, Hakan. "Being Modern in Nurcu Way". *ISIM Newsletter*, June 2000.
- AKP Menang Mutlak Pemilu di Turki", <http://www.bersamadakwah.com>, 11 Desember 2003.
- Historical of Development Party", <http://www.eng.akparty.org>, 2 April 2014
- Justice and Dvelopment Party Turkey", <http://en.wikipedia.org/wiki/justice>, pada 5 Januari 2014.
- Parlementary Election", <http://www.eng.akp.org>, 9 April 2014
- Political Parties and Election System", <http://www.allaboutturkey.com>; "Results of Parlementary Election, 3 February 2014
- Political Parties and Election System", <http://www.turkisembassy.org>, 5 February 2014
- Turkish General Staf, http://www.tsk.mil.tr/10_ARSIV-1-Basin-Yayin-Faalry-, 7 January 2014

Presentase Perolehan suara partai politik di Turki tahun 2002

Adalet ve Kalkinma Partisi: 34.6 % Cumhuriyet Halk Partisi: 19.6 % Dogru Yol Partisi: 9.6 % Milliyetçi Hareket Partisi: 8.4 % Genç Parti: 7.3 % Demokratik Halk Partisi: 6.3 % Anavatan Partisi: 5.2 % Saadet Partisi: 2.5 % Demokratik Sol Parti: 1.2 % Yeni Türkiye Partisi: 1.2 % Büyük Birlik Partisi: 1.0 % Bağımsız: 1.0 % İşçi Partisi: 0.5 % Bağımsız Türkiye Partisi: 0.5 % Özgürlük ve Dayanışma Partisi: 0.3 % Liberal Demokrat Parti: 0.3 % Millet Partisi: 0.2 % Türkiye Komünist Partisi: 0.2 % Yeni Parti: 0.0 % Sosyaldemokrat Halkçı Parti: 0.0 % Sosyalist iktidar Partisi: 0.0 % Saadet Partisi: 0.0 % Demokrat Parti: 0.0 % Aydınlik Türkiye Partisi: 0.0 % Yeni Demokrasi Hareketi: 0.0 % Yeniden Doğuş Partisi: 0.0 % Birlik Partisi: 0.0 % Refah Partisi: 0.0 % Değişen Türkiye Partisi: 0.0 % Demokratik Toplum Partisi: 0.0 % Emek Partisi 0.0 %.

Presentase Perolehan suara partai politik di Turki tahun 2006

Adalet ve Kalkinma Partisi: 46.6 % Cumhuriyet Halk Partisi: 20.9 % Milliyetçi Hareket Partisi: 14.3 % Demokrat Parti: 5.4 % Bağımsız: 5.2 % Genç Parti: 3.0 % Saadet Partisi: 2.3 % Bağımsız Türkiye Partisi: 0.5

%Halkin Yükselişi Partisi: 0.5 % işçi Partisi: 0.4 % Aydinlik Türkiye Partisi: 0.3 % Türkiye Komünist Partisi: 0.2 % Özgürlük ve Dayanışma Partisi: 0.1 % Liberal Demokrat Parti: 0.1 % Emek Partisi: 0.1 % Değişen Türkiye Partisi: 0.0 %

Presentase Perolehan suara partai politik di Turki tahun 2011

Adalet ve Kalkınma Partisi: 49.8 % Cumhuriyet Halk Partisi: 26.0 % Milliyetçi Hareket Partisi: 13.0 % Bağımsız: 6.6 % Saadet Partisi: 1.3 % Halkın Sesi Partisi: 0.8 % Büyük Birlik Partisi: 0.8 % Demokrat Parti: 0.7 % Hak ve Eşitlik Partisi: 0.3 % Demokratik Sol Parti: 0.3 % Doğru Yol Partisi: 0.2 % Türkiye Komünist Partisi: 0.1 % Millet Partisi: 0.1 % Milliyetçi ve Muhafazakar Parti: 0.1 % Emek Partisi: 0.1 % Liberal Demokrat Parti: 0.0 %

Sumber : <http://www.akparti.org.tr/english>